

**PENGARUH PENDIDIKAN, UPAH MINIMUM, DAN JUMLAH
PENDUDUK TERHADAP PENGANGGURAN DI KABUPATEN/KOTA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

TUGAS AKHIR

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana



**GUSTI SYAFIQ DARMAWAN
NIM. B1011191116**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2023**

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Gusti Syafiq Darmawan
NIM : B1011191116
Jurusan : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum, dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Tugas Akhir dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 8 Juni 2023

A rectangular official stamp with a yellow background. It features the Garuda Pancasila emblem at the top center. Below the emblem, the text 'KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN KEMAHASISWAAN RI' is printed in a small font. In the center, 'METERAI TEMPEL' is printed in a larger font. At the bottom, the alphanumeric code '2EAKX47781699' is visible. A blue ink signature is written over the stamp.

Gusti Syafiq Darmawan

NIM. B1011191116

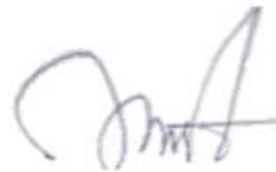
PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Gusti Syafiq Darmawan
NIM : B1011191116
Jurusan : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum, dan
Jumlah Penduduk Terhadap Pengangguran di
Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir (TA) ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, 8 Juni 2023



Gusti Syafiq Darmawan

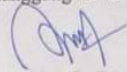
NIM. B1011191116

LEMBAR YURIDIS

LEMBAR YURIDIS

Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum, dan Jumlah Penduduk
Terhadap Pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat

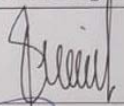
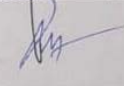
Penanggung Jawab Yuridis



Gusti Syafiq Darmwan
B1011191116

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Tgl Ujian Tugas Akhir (TA) : Selasa / 30 Mei 2023

Majelis Penguji

No.	MajelisPenguji	Nama/NIP	Tgl/bln/thn	TandaTangan
1	Pembimbing TA	Dr. Jumhur, S.E., M.Si	7/6 2023	
		NIP. 196709281997021001		
2	Ketua Penguji	Dr. Bustami, S.E., M.Si	6/6 2023	
		NIP. 196206121989031004		
3	Anggota Penguji	Fara Dina, S.E., M.E.	6/6 2023	
		NIP. 198607302019032010		

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Tugas Akhir (TA)

Pontianak, 8 Juni 2023
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan




Dr. Eni Panca Kurniasih, S.E., M.Si
NIP. 197206071998032001

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran ALLAH S.W.T Yang Maha Esa, atas berkat, hikmat dan kasih karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir dengan judul **“Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum, dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat”** yang merupakan syarat akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Strata 1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini tidak terlepas dari keterlibatan banyak pihak yang membantu, memberikan saran dan masukan. Dalam kesempatan ini penulis dengan kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Barkah, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Nurul Bariyah, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Erni Panca Kurniasih, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Bapak Dr. Jumhur, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah banyak membimbing, membantu, serta memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga penulisan tugas akhir ini dapat berjalan lancar dan selesai.
5. Bapak Dr. H. Bustami, S.E., M.Si. selaku dosen penguji pertama yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penulisan tugas akhir ini.
6. Ibu Fara Dina, S.E, M.E. selaku dosen penguji kedua yang juga telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penulisan tugas akhir ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang memberikan banyak ilmunya kepada penulis terkhusus Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
8. Seluruh Staf Akademik, Perpustakaan, dan Tata Usaha serta seluruh karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura yang membantu dalam proses administrasi demi kelancaran Tugas Akhir ini.
9. Teruntuk orang tua penulis tercinta, Bapak Gusti Abdul Munif dan Ibu Siti Juwariyah terima kasih atas segala doa, kasih sayang, dan motivasi yang selalu mengiringi setiap langkah penulis serta dukungan moril maupun

materil yang selalu diberikan. Mereka adalah Guru pertama bagi penulis dalam kehidupan.

10. Teruntuk adik penulis, Gusti Muhammad Taufiq Chaerullah yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir.
11. Teruntuk kakak penulis, Utin Erni Afriyaningsih dan Utin Mufti Dewi Hartiningsih yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir serta seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut memberikan dukungan dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
12. Teruntuk tunangan penulis, Maiska Adelin yang menemani penulis sejak SMA hingga Perkuliahan selesai dan selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir.
13. Kelas IESP C terima kasih atas segala bantuan dan motivasi serta mereka menemani dan mewarnai hari-hari penulis selama perkuliahan di kelas IESP C.
14. Kepada teman-teman seperjuangan IESP angkatan 2019 yang telah memberikan banyak bantuan dan dukungan selama masa perkuliahan.
15. Kemudian, kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
16. Terakhir penulis juga ingin berterima kasih kepada diri sendiri yang telah bertahan dan berjuang selama pengerjaan Tugas Akhir ini. Sungguh bukan karena penulis yang hebat tapi ALLAH S.W.T yang menolong.

Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan dapat pula dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya. Kritik dan saran yang bersifat membangun dan bertujuan untuk perbaikan tugas akhir ini sangat diharapkan, sehingga menjadi tugas akhir yang baik.

Pontianak, 9 Juni 20223



Gusti Syafiq Darmawan

NIM. B1011191116

**PENGARUH PENDIDIKAN, UPAH MINIMUM, DAN JUMLAH
PENDUDUK TERHADAP PENGANGGURAN DI KABUPATEN/KOTA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh variabel pendidikan, upah minimum, dan jumlah penduduk terhadap pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari publikasi Badan Pusat Statistik berupa data panel terdiri dari *cross section* dan *time series* yaitu 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat dari tahun 2017-2021. Pada penelitian ini digunakan uji regresi linear berganda diolah dengan alat *statistic* yaitu *software Eviews 9*. Adapun model yang paling tepat digunakan adalah *Random Effect Model* (REM). Dari hasil penelitian secara parsial bahwa pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran di Kalimantan Barat. Sedangkan upah minimum memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengangguran di Kalimantan Barat, dan Jumlah Penduduk memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran di Kalimantan Barat. Dilihat secara simultan pendidikan, upah minimum, dan jumlah penduduk memiliki pengaruh terhadap pengangguran di Kalimantan Barat dengan nilai koefisien determinasi sebesar 75,09% dan sisanya 24,91% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Kata Kunci : pendidikan, upah minimum, jumlah penduduk, pengangguran.

**PENGARUH PENDIDIKAN, UPAH MINIMUM, DAN JUMLAH
PENDUDUK TERHADAP PENGANGGURAN DI KABUPATEN/KOTA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Oleh : Gusti Syafiq Darmawan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura

RINGKASAN

1. Latar Belakang

Sumber daya manusia, yakni penduduk merupakan aspek utama yang berperan krusial dalam pembangunan ekonomi. Namun, keberhasilan dari suatu pembangunan tidak selalu bergantung pada besarnya jumlah penduduk dan justru besarnya jumlah penduduk dapat menjadi beban dalam keberlangsungan pembangunan. Kesenjangan yang terjadi antara besarnya jumlah penduduk terhadap kesempatan kerja yang tersedia dapat mengakibatkan muncul dan meningkatnya angka pengangguran pada sebagian penduduk usia produktif (Sulistiawati, 2012).

Masalah pengangguran termasuk masalah dalam lingkup sosial, seperti tindakan kejahatan/kriminalitas dan masalah ekonomi. Keadaan tersebut mengakibatkan terjadinya penurunan pada tingkat kesejahteraan dan daya beli masyarakat. Kemakmuran kehidupan masyarakat dalam suatu negara dapat dilihat dari tingkat penganggurannya, apabila angka pengangguran rendah maka menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat tersebut makmur dan begitu pula sebaliknya. Salah satu faktor yang dapat memengaruhi tinggi rendahnya angka pengangguran, yaitu tingginya ketentuan kriteria yang ditetapkan oleh suatu perusahaan terhadap para tenaga kerja yang sedang dicari. Angka pengangguran

akan meningkat seiring dengan tingginya ketentuan kriteria yang diinginkan oleh suatu perusahaan dalam proses perekrutan tenaga kerja.

Menurut (Suhaidi & Setyowati, 2022), pendidikan berkontribusi dalam mempengaruhi jumlah pengangguran. Kualitas tenaga kerja tercermin pada tingkat pendidikan dengan diukur lamanya pendidikan. Tingkat pendidikan semakin tinggi maka berdampak pada kemampuan seseorang untuk mendapatkan kesempatan dalam bekerja. Tingginya tingkat pendidikan seseorang menggambarkan kualitas kompetensi dan keahlian yang beragam sehingga dapat meningkatkan dan memperluas kesempatan kerja serta dapat membantu menurunkan angka pengangguran.

Upah merupakan pembayaran yang diberikan pada pekerja oleh pemberi kerja setelah dilakukannya suatu pekerjaan atau jasa secara fisik maupun mental. Menurut (Sukirno, 2015), Upah minimum merupakan upah yang sangat menentukan kehidupan tenaga kerja. Sedangkan menurut (Purnami, 2015), Upah minimum merupakan sebuah standar minimum gaji yang diberikan oleh para pebisnis, yang mempunyai ekuitas, yang berperan dalam industri, yang memberi gaji dalam lingkup korporasinya. Maka dari itu, tenaga kerja memerlukan kemampuan, *skill*, ilmu dan pengalaman yang baik guna mendapatkan upah yang tinggi. Ketika tenaga kerja kurang memiliki *skill*, maka upah yang akan diterima juga rendah. Hal ini yang membuat kehidupan tenaga kerja tidak tercukupi dengan baik.

2. Permasalahan

Kondisi ketenagakerjaan di Kalimantan Barat yakni tingkat pengangguran yang tinggi dimana jumlah pengangguran pada tahun 2020 sebesar 5,81% dan meningkat di tahun 2021 menjadi 5,82%. Terdapat perbedaan antara besarnya angka pengangguran terhadap pendidikan, upah minimum, serta jumlah penduduk di setiap Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Masalah yang terjadi ketika kebanyakan lama sekolah dalam pendidikan formal di daerah sebagian masih rendah, upah minimum meningkat setiap tahunnya, jumlah penduduk semakin bertambah, sehingga menimbulkan persaingan antara tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan, namun dengan lapangan kerja yang kurang memadai dan tingkat

pendidikan para pencari kerja masih rendah. Sehingga, perusahaan hanya ingin memilih tenaga kerja yang menunjukkan *skill* atau keterampilan dan pendidikan yang tinggi dengan keterbatasan pada lapangan pekerjaan.

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pendidikan terhadap pengangguran di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh upah minimum terhadap pengangguran di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap pengangguran di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat

4. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan analisis regresi linier berganda dalam menjalankan pengujian terhadap hipotesis penelitian.. Adapun Jenis penelitian ini ialah penelitian kuantitatif. Pada penelitian ini menggunakan uji regresi linear berganda dengan metode yang terpilih yaitu *Random Effect Model* (REM). Data yang digunakan diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan diolah menggunakan software Eviews 9.

5. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menemukan bahwa variabel pendidikan positif dan signifikan terhadap pengangguran di Kalimantan Barat, upah minimum positif dan tidak signifikan terhadap pengangguran di Kalimantan Barat, dan jumlah penduduk berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran di Kalimantan Barat. Adapun secara simultan bahwa variabel pendidikan, upah minimum dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Kalimantan Barat dengan nilai koefisien determinasi sebesar 75,09%

6. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian memperlihatkan pendidikan berpengaruh terhadap pengangguran di Kalimantan Barat. Ini disebabkan karena pendidikan merupakan investasi yang penting bagi individu maupun masyarakat, sehingga

membuka peluang mendapatkan profesi yang luas untuk orang-orang yang memiliki taraf pendidikan yang lebih tinggi. Namun, hal tersebut tidak disertai dengan ketersediaan peluang kerja. Kemudian, upah minimum dan jumlah penduduk yang tidak berpengaruh terhadap pengangguran di Kalimantan Barat. Hal tersebut dikarenakan kenaikan pada upah minimum setiap tahunnya tidak begitu berdampak dalam permintaan pekerja dan jumlah penduduk yang didominasi usai produktif tidak akan mempengaruhi tingkat pengangguran.

Adapun rekomendasi atau saran untuk pemerintah yaitu Pemerintah daerah di setiap Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat hendaknya harus melakukan pemerataan serta menyediakan fasilitas sarana prasarana yang baik di tiap daerah di Kalimantan Barat dalam upaya untuk menunjang proses pendidikan guna menghasilkan kualitas pada sumber daya manusia yang terbaik. Bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat melakukan kerja sama dengan pihak lainnya dalam menentukan penetapan upah minimum dan mempertimbangkan kemampuan dari perusahaan serta keperluan hidup bagi pekerja pun perlu dalam memperhitungkan dampak dari tingkat upah. Pemerintah daerah di setiap Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat hendaknya membuat kebijakan yang dapat mendorong pemilik modal untuk membangun berbagai perusahaan baru sehingga berpeluang menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas dan merata. Hal ini dikarenakan Provinsi Kalimantan Barat memiliki potensi sumber daya alam yang kaya, apabila dimanfaatkan dengan baik akan berdampak pada perekonomian di Kalimantan Barat. Diharapkan pada penelitian selanjutnya bisa menambah variabel bebas lain atau menerapkan model kajian yang tidak sama agar perolehan penelitian lebih sempurna

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT	i
PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR.....	ii
LEMBAR YURIDIS.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
ABSTRAK	vi
RINGKASAN.....	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
1. PENDAHULUAN	1
2. KAJIAN LITERATUR	7
2.1. Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja.....	7
2.2. Pengangguran.....	7
2.3. Pendidikan	7
2.4. Upah	8
2.5. Kependudukan	8
2.6. Hubungan Pendidikan Terhadap Pengangguran	8
2.7. Hubungan Upah Minimum Terhadap Pengangguran.....	9
2.8. Hubungan Jumlah Penduduk Terhadap Pengangguran.....	9
2.9. Kajian Empiris	10
2.10. Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian	11
2.11. Hipotesis Penelitian.....	11
3. METODE PENELITIAN	12
4. HASIL DAN PEMBAHASAN	15
4.1. Hasil Penelitian	15
4.2. Pembahasan	20

5.	SIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	24
	DAFTAR PUSTAKA	25
	LAMPIRAN	28

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2021 (Persen).....	3
Tabel 1. 2 Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2022 (Tahun)	4
Tabel 1. 3 Upah Minimum Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2021 (Rupiah)	5
Tabel 1. 4 Jumlah Penduduk Berumur 15 tahun Keatas Yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2021 (Jiwa).....	6
Tabel 4. 1 Hasil Uji Chow, Uji Hauman, Uji Lagrange Multiplier	16
Tabel 4. 2 Hasil Regresi Linier Berganda <i>Model Random Effect</i>	16
Tabel 4. 3 Hasil Uji Koefisien Determinasi R^2	17
Tabel 4. 4 Hasil Uji Signifikan t.....	18
Tabel 4. 5 Hasil Uji Normalitas dan Uji Heteroskedastisitas.....	18
Tabel 4. 6 Hasil Uji Multikolinearitas	19
Tabel 4. 7 Hasil Uji Autokorelasi	19
Tabel 4. 8 Angka Melek Huruf di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017-2021..	20
Tabel 4. 9 Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	21
Tabel 4. 10 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kab/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2017-2021.....	23
Tabel 4. 11 Jumlah Penduduk yang Bekerja Mandiri di Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2017-2021.....	24

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual.....	11

PENGARUH PENDIDIKAN, UPAH MINIMUM, DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PENGANGGURAN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Gusti Syafiq Darmawan*

Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to test and analyze the effect of education, minimum wage, and population variables on unemployment in the districts/cities of West Kalimantan province. This study uses secondary data obtained from the publication of the Central Statistics Agency in the form of panel data consisting of cross sections and time series, namely 14 Regencies/Cities in West Kalimantan from 2017-2021. In this study, multiple linear regression tests were used and processed with a statistical tool, namely Eviews 9 software. The most appropriate model used was the Random Effect Model (REM). From the partial results of research that education has a positive and significant impact on unemployment in West Kalimantan. Meanwhile, the minimum wage has a positive and insignificant effect on unemployment in West Kalimantan, and population has a negative and insignificant effect on unemployment in West Kalimantan. Viewed simultaneously education, minimum wage, and population have an influence on unemployment in West Kalimantan with a determination coefficient value of 75,09% and the rest is 24,91% influenced by other factors that are not used in this study..

Keywords : *education, minimum wage, and population variables.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh variabel pendidikan, upah minimum, dan jumlah penduduk terhadap pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari publikasi Badan Pusat Statistik berupa data panel terdiri dari *cross section* dan *time series* yaitu 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat dari tahun 2017-2021. Pada penelitian ini digunakan uji regresi linear berganda diolah dengan alat *statistic* yaitu *software Eviews 9*. Adapun model yang paling tepat digunakan adalah *Random Effect Model* (REM). Dari hasil penelitian secara parsial bahwa pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran di Kalimantan Barat. Sedangkan upah minimum memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengangguran di Kalimantan Barat, dan Jumlah Penduduk memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran di Kalimantan Barat. Dilihat secara simultan pendidikan, upah minimum, dan jumlah penduduk memiliki pengaruh terhadap pengangguran di Kalimantan Barat dengan nilai koefisien determinasi sebesar 75,09% dan sisanya 24,91% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Kata Kunci : pendidikan, upah minimum, jumlah penduduk, pengangguran.

1. PENDAHULUAN

Kalimantan Barat ialah salah satu provinsi yang mempunyai wilayah yang strategis di regional Kalimantan, karena berdekatan dengan perbatasan luar negeri seperti Malaysia. Oleh karena itu, Kalimantan Barat mudah untuk menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Beberapa dampak yang terjadi adanya MEA yaitu meningkatnya tenaga kerja asing yang datang ke wilayah Indonesia, sehingga tenaga kerja Indonesia dikhawatirkan akan

*maiska.syafiq@gmail.com

sukar untuk berkompetisi dengan tenaga kerja asing jika tidak dipersiapkan dengan baik dari segi apapun, termasuk dalam kualitas tenaga kerja. Apabila tenaga kerja di Kalimantan Barat kalah bersaing dengan tenaga kerja asing, maka akan menyebabkan pengangguran semakin meningkat.

Sumber daya manusia, yakni penduduk merupakan aspek utama yang berperan krusial dalam pembangunan ekonomi. Namun, keberhasilan dari suatu pembangunan tidak selalu bergantung pada besarnya jumlah penduduk dan justru besarnya jumlah penduduk dapat menjadi beban dalam keberlangsungan pembangunan. Kesenjangan yang terjadi antara besarnya jumlah penduduk terhadap kesempatan kerja yang tersedia dapat mengakibatkan muncul dan meningkatnya angka pengangguran pada sebagian penduduk usia produktif (Sulistiawati, 2012).

Menurut (Sukirno, 2016) pengangguran terbuka merupakan setiap orang yang telah termasuk dalam angkatan kerja dan telah siap untuk menjalani suatu pekerjaan, akan tetapi belum mendapatkan pekerjaan, atau sedang berusaha mendapatkan atau mencari pekerjaan, yang mendirikan atau menjalankan suatu bisnis, atau individu yang belum bekerja. Sedangkan dalam Badan Pusat Statistik, pengangguran diartikan sebagai setiap warga negara yang sedang tidak bekerja, namun ia berusaha untuk mendapatkan suatu pekerjaan atau sedang merencanakan dan bersiap untuk bisnis yang baru, atau warga yang sedang mencari sebuah pekerjaan disebabkan oleh memiliki perasaan tidak mungkin untuk memperoleh suatu pekerjaan, atau mereka yang tidak sedang mencari pekerjaan dikarenakan telah memiliki pekerjaan, namun belum memulainya (BPS, 2023).

Hakikat dari suatu pembangunan ekonomi adalah keseluruhan usaha kebijakan yang memiliki beberapa tujuan penting, seperti memperbaiki dan menaikkan taraf kehidupan di lingkungan bermasyarakat, memperbesar dan menambah peluang untuk bekerja, serta mengatur distribusi atau pembagian pendapatan yang lebih merata. Masalah pengangguran termasuk masalah dalam lingkup sosial, seperti tindakan kejahatan/kriminalitas dan masalah ekonomi. Keadaan tersebut mengakibatkan terjadinya penurunan pada tingkat kesejahteraan dan daya beli masyarakat. Kemakmuran kehidupan masyarakat dalam suatu negara dapat dilihat dari tingkat penganggurannya, apabila angka pengangguran rendah maka menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat tersebut makmur dan begitu pula sebaliknya. Salah satu faktor yang dapat memengaruhi tinggi rendahnya angka pengangguran, yaitu tingginya ketentuan kriteria yang ditetapkan oleh suatu perusahaan terhadap para tenaga kerja yang sedang dicari. Angka pengangguran akan meningkat seiring dengan tingginya ketentuan kriteria yang diinginkan oleh suatu perusahaan dalam proses perekrutan tenaga kerja. Sebagai contoh, banyak perusahaan yang menetapkan kriteria atau syarat dalam menerima tenaga kerja, yaitu minimal pendidikan para pencari kerja adalah sarjana ataupun diploma. Oleh sebab itu, suatu pengangguran merupakan tugas bersama, dimana pemerintah bertanggung jawab lebih besar sebagai penunjang yang mengarahkan proses perbaikan atau peningkatan mutu masyarakat, dan tetap berusaha mencari solusi terbaik dengan cara menciptakan langkah-langkah yang sistematis dan strategis sebagai bentuk usaha dalam menangani permasalahan dalam pembangunan ekonomi.

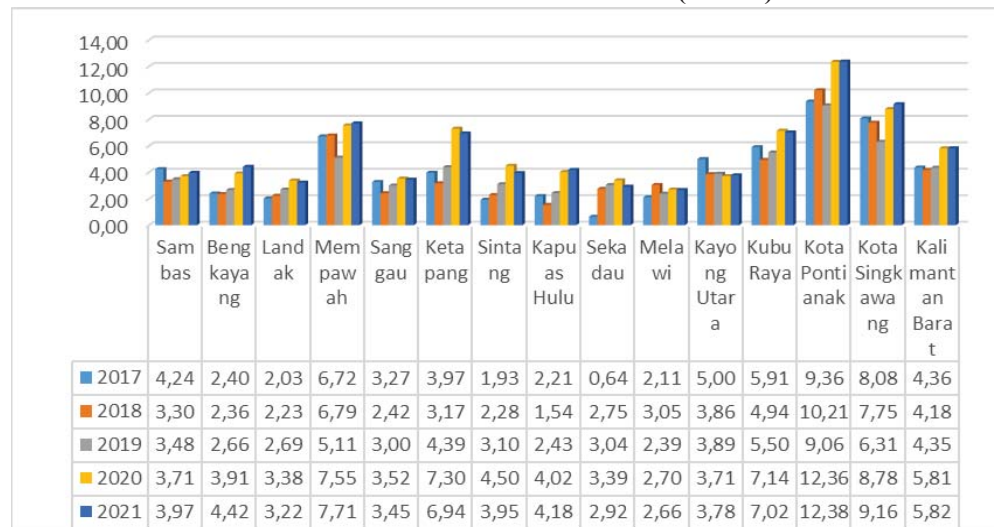
Tenaga kerja bisa menjadi sumber acuan dalam mengukur keberhasilan yang dicapai pada pembangunan suatu daerah. Dalam hal ini, permintaan pada tenaga kerja dapat

memberikan andil penting dalam menunjang suatu keberhasilan dalam pembangunan, yaitu dengan cara memberikan perlindungan kepada para tenaga kerja. Kualitas yang baik pada tenaga kerja dapat diidentifikasi dari tingkat pendidikannya, maka akan dibutuhkan oleh banyak perusahaan. Ini terjadi akibat pendidikan yang dimiliki akan mempengaruhi kualitas kerja, maka bisa diucapkan bahwa pendidikan memegang peran penting dalam menciptakan kualitas kerja yang tinggi.

Menurut (Suhaidi & Setyowati, 2022), pendidikan berkontribusi dalam mempengaruhi jumlah pengangguran. Kualitas tenaga kerja tercermin pada tingkat pendidikan dengan diukur lamanya pendidikan. Tingkat pendidikan semakin tinggi maka berdampak pada kemampuan seseorang untuk mendapatkan kesempatan dalam bekerja. Tingginya tingkat pendidikan seseorang menggambarkan kualitas kompetensi dan keahlian yang beragam sehingga dapat meningkatkan dan memperluas kesempatan kerja serta dapat membantu menurunkan angka pengangguran.

Di Kalimantan Barat permasalahan yang terjadi salah satunya adalah masalah ketenagakerjaan yaitu kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan, besarnya jumlah pengangguran dan masalah-masalah ketenagakerjaan lainnya. Pada tabel 1.1 menunjukkan perubahan persentase tingkat pengangguran terbuka menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat tahun 2017-2021.

Tabel 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2021 (Persen)



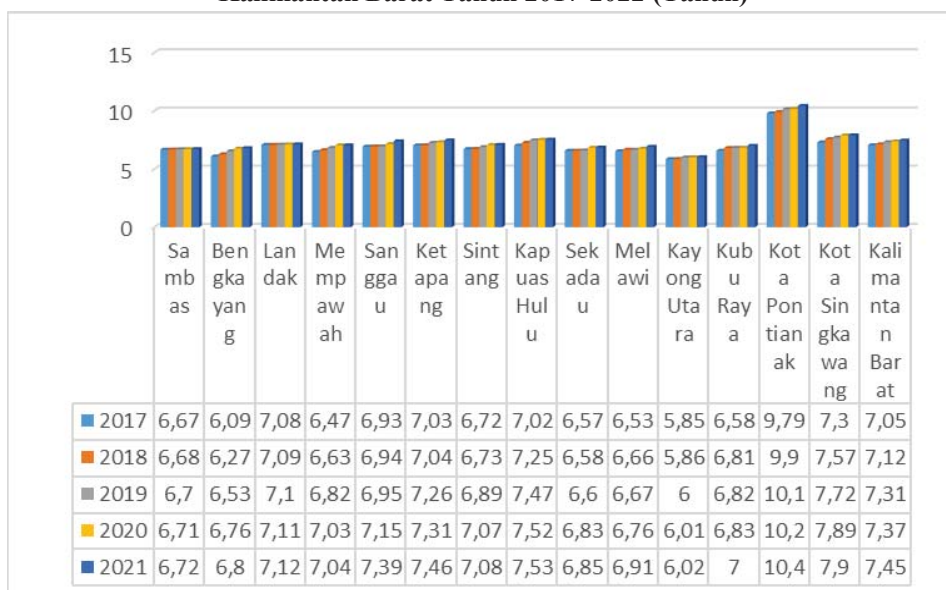
Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat (2023)

Berdasarkan data pada tabel 1.1, memperlihatkan data di atas bisa kita lihat bahwa tingkat pengangguran terbuka menurut kabupaten/kota di Kalimantan Barat yang paling tinggi pada tahun 2021 adalah di Kota Pontianak dengan angka 12,38% artinya angka pengangguran di Kota Pontianak masih sangat tinggi dari pada Kabupaten/Kota lainnya. Angka pengangguran di Kota Pontianak dalam 5 tahun terakhir menjadi yang paling tinggi angka penganggurannya, artinya di Kota Pontianak tersedianya lapangan pekerjaan masih belum cukup bagi tenaga kerja sehingga masih banyak pengangguran. Dalam hal ini disebabkan oleh sulitnya terbuka lapangan pekerjaan sehingga masih banyak pengangguran di Kalimantan Barat. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi tinggi rendahnya tingkat

pengangguran di provinsi Kalimantan Barat yakni pendidikan, upah minimum serta jumlah penduduk.

Pendidikan adalah satu dari berbagai aspek yang terpenting dalam dunia kerja. Dengan pendidikan, seseorang dapat mempunyai modal untuk melakukan suatu pekerjaan dan memiliki kualitas kerja serta pengalaman yang baik selaras dengan menggunakan taraf pendidikan yang dimiliki. Semakin tinggi pendidikan yang dicapai, semakin tinggi juga kualitas seseorang. Pada tabel 1.2 memperlihatkan rata-rata lama sekolah menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat tahun 2017-2021.

Tabel 1.2 Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2022 (Tahun)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat (2022)

Tabel 1.2 menunjukkan rata-rata lama dalam menyelesaikan sekolah di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021 sebesar 7,45 tahun. Rata-rata tertinggi untuk waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan sekolah pada tahun 2021, yaitu Kota Pontianak sebesar 10,43 tahun. Maknanya, rata-rata penduduk di Kota Pontianak menempuh pendidikan yang ditamatkan hanya 10 tahun (tamat SMP). Sedangkan yang paling rendah pada tahun 2021, yaitu Kabupaten Kayong Utara sebesar 6,02 tahun. Artinya, rata-rata penduduk di Kabupaten Kayong Utara menempuh pendidikan hanya 6 tahun yang ditamatkan (tamat SD). Adapun hal yang membuat angka pendidikan di Kayong Utara dikategorikan terendah disebabkan oleh terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang pendidikan formal, permasalahan ekonomi, serta kurangnya motivasi untuk menempuh pendidikan.

Rata-rata lama sekolah diartikan sebagai nilai rata dari keseluruhan jumlah tahun pendidikan yang diselesaikan oleh masyarakat. Lebih rincinya, rata-rata tahun bersekolah adalah jumlah rata-rata yang diperlukan dan diselesaikan suatu penduduk dengan rentang usia di atas 15 tahun dalam menempuh pendidikan, 6 tahun bagi lulusan SD, 9 tahun bagi lulusan SMP, dan 12 tahun bagi lulusan SMA.

Perhitungan rata-rata lama sekolah memiliki kegunaan yaitu memberikan gambaran tentang kualitas pendidikan penduduk di wilayah Kalimantan Barat. Perhitungan

rata-rata lama sekolah menerangkan tingkat pencapaian tiap penduduk saat kegiatan pendidikan formal. Dengan asumsi bahwa terjadinya peningkatan pada rata-rata untuk waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan sekolah artinya semakin tinggi pula tingkat pendidikannya, sehingga dengan perhitungan ini penting dan dibutuhkan agar dapat mengetahui kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. Jika angka rata-rata lama sekolah rendah, maka dapat diberikan solusi seperti fasilitas yang memadai, beasiswa baik berprestasi maupun yang kurang mampu, dan lain sebagainya.

Upah merupakan pembayaran yang diberikan pada pekerja oleh pemberi kerja setelah dilakukannya suatu pekerjaan atau jasa secara fisik maupun mental. Menurut (Sukirno, 2015), Upah minimum merupakan upah yang sangat menentukan kehidupan tenaga kerja. Sedangkan menurut (Purnami, 2015), Upah minimum merupakan sebuah standar minimum gaji yang diberikan oleh para pebisnis, yang mempunyai ekuitas, yang berperan dalam industri, yang memberi gaji dalam lingkup korporasinya. Maka dari itu, tenaga kerja memerlukan kemampuan, *skill*, ilmu dan pengalaman yang baik guna mendapatkan upah yang tinggi. Ketika tenaga kerja kurang memiliki *skill*, maka upah yang akan diterima juga rendah. Hal ini yang membuat kehidupan tenaga kerja tidak tercukupi dengan baik.

Tabel 1. 3 Upah Minimum Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2021 (Rupiah)

Kabupaten/Kota	UMP/UMK				
	2017	2018	2019	2020	2021
Sambas	2.022.800	2.200.000	2.377.000	2.580.000	2.609.393
Bengkayang	2.013.450	2.189.000	2.364.777	2.566.091	2.586.291
Landak	2.000.920	2.175.200	2.349.870	2.549.844	2.582.000
Mempawah	1.901.005	2.066.600	2.232.600	2.422.594	2.437.279
Sanggau	1.973.425	2.145.310	2.318.000	2.515.262	2.547.405
Ketapang	2.172.500	2.439.300	2.636.000	2.860.323	2.876.252
Sintang	2.025.000	2.215.000	2.393.000	2.596.644	2.611.966
Kapuas Hulu	2.028.800	2.204.650	2.381.700	2.483.000	2.486.796
Sekadau	1.931.180	2.099.386	2.267.970	2.461.000	2.486.031
Melawi	1.948.500	2.118.214	2.288.306	2.483.040	2.515.896
Kayong Utara	2.130.300	2.315.850	2.501.850	2.714.750	2.748.507
Kubu Raya	1.907.040	2.075.000	2.242.000	2.433.000	2.467.630
Kota Pontianak	1.972.000	2.145.000	2.318.000	2.515.000	2.579.616
Kota Singkawang	1.991.529	2.164.991	2.338.840	2.537.875	2.596.120
Kalimantan Barat	1.889.900	2.046.900	2.211.500	2.399.698	2.434.328

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat (2022)

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa upah minimum di Provinsi Kalimantan Barat meningkat antara tahun 2017 dan 2021, yaitu pada tahun 2021 sebesar Rp. 2.434.328. Di antara Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, kenaikan upah minimum tertinggi tahun 2021 di Kabupaten Ketapang sebesar Rp. 2.876.252. Sedangkan untuk upah

minimum terendah Kabupaten/Kota tahun 2021, yaitu Kabupaten Mempawah sebesar Rp. 2.437.279. Dengan data yang tersaji, Kabupaten Ketapang memperoleh upah minimum Kabupaten/Kota yang tertinggi setiap tahunnya selama 5 tahun terakhir.

Tabel 1. 4 Jumlah Penduduk Berumur 15 tahun Keatas Yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2021 (Jiwa)

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Diatas Umur 15 Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Sambas	258.052	265.433	268.913	293.125	290.242
Bengkayang	124.964	131.664	129.369	140.918	132.607
Landak	193.719	195.314	180.893	199.077	198.391
Mempawah	117.319	120.203	118.295	125.463	120.592
Sanggau	232.81	244.079	235.732	250.827	251.041
Ketapang	210.311	237.918	239.776	252.375	233.445
Sintang	205.388	208.508	211.912	233.445	243.809
Kapuas Hulu	142.771	141.104	146.309	146.654	146.651
Sekadau	115.491	108.974	111.776	116.479	108.923
Melawi	111.964	108.014	111.394	115.559	114.766
Kayong Utara	45.248	50.736	52.114	54.405	55.171
Kubu Raya	254.314	252.023	266.776	290.584	293.917
Kota Pontianak	297.834	291.925	299.065	302.735	317.161
Kota Singkawang	98.045	95.504	106.963	107.152	110.114
Kalimantan Barat	2.4008.259	2.451.399	2.479.287	2.609.857	2.635.760

Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat (2022)

Berdasarkan Tabel 1.4, jumlah penduduk berdasarkan rentang umur lebih dari 15 tahun di Provinsi Kalimantan Barat terus bertambah seiring berjalannya waktu. Wilayah yang memiliki populasi tertinggi dari tahun ke tahun, yaitu di Kota Pontianak dengan angka di tahun 2021 sebesar 317,161 jiwa. Sementara wilayah dengan jumlah penduduk terendah yaitu Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2021 sebesar 55,171 jiwa. Kota Pontianak menjadi salah satu kota yang memiliki banyak jumlah penduduk karena selain angka kelahiran yang tinggi, angka urbanisasi juga tinggi, dan Kota Pontianak merupakan daerah perkotaan yang diminati oleh masyarakat di daerah-daerah Kalimantan Barat. Hal ini disebabkan lebih majunya perkotaan dibanding daerah serta kurangnya lapangan pekerjaan di daerah yang mengakibatkan penduduk lebih memilih untuk mencari pekerjaan di kota. Hal ini yang mengakibatkan tingkat pengangguran semakin tinggi.

Berdasarkan dari uraian di atas mengenai kondisi di Provinsi Kalimantan Barat, maka dapat ditarik inti permasalahan dari pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. Beberapa aspek yang memberi dampak terjadinya pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat yakni rendahnya pendidikan, tingkat upah minimum yang tiap tahunnya meningkat dengan signifikan, serta jumlah penduduk yang terus bertambah dikarenakan adanya transmigrasi dari luar daerah dan juga melonjaknya angka kelahiran. Dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti Pengaruh

Pendidikan, Upah Minimum, dan Jumlah Penduduk terhadap Pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1. Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja

Permintaan pada suatu produksi secara tidak langsung dapat memengaruhi permintaan tenaga kerja. Dalam kondisi terjadi kenaikan permintaan pada suatu produk, maka akan mengakibatkan perusahaan tersebut berusaha untuk menambah jumlah tenaga kerjanya sebagai bentuk upaya mengatasi hal tersebut. Permintaan tenaga kerja dikatakan sebagai permintaan turunan (*derived demand*) (Borjas, 2016). Permintaan akan tenaga kerja memiliki peranan krusial untuk menilai suatu peraturan (Peichl & Sieglöcher, 2012). Permintaan tenaga kerja mempunyai sifat tersendiri di pasarnya. Dalam hal ini, pekerjaan tidak dibeli untuk menutupi kebutuhan pekerjaan, tetapi karena tugas khusus harus dilakukan dan layanan harus diberikan (Abdurakhmanov & Zokirova, 2013).

Penawaran tenaga kerja merupakan suatu pekerjaan yang ditawarkan oleh pemegang pekerjaan dengan upah tertentu untuk jangka waktu tertentu. Jumlah total pekerjaan yang diberikan kepada perekonomian memiliki ketergantungan pada taraf upah yang pasar tawarkan. Penawaran tenaga kerja dipengaruhi oleh banyak sedikitnya kuantitas penduduk usia kerja yang bekerja. Semakin banyak pekerjaan, semakin banyak tawaran pekerjaan tumbuh (Santoso, 2012). Kajian terhadap penawaran tenaga kerja mengasumsikan bahwa baik kuantitas pekerjaan maupun tingkat kualifikasi profesional tidak akan berubah. Efek kompensasi dan efek pendapat bisa dimanfaatkan dalam proses analisis pengaruh perubahan pada tingkat upah terhadap penawaran tenaga kerja. Dengan melalui efek substitusi, perubahan pada tingkat upah akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada biaya kesempatan waktu luang sehingga membuatnya bersifat lebih mahal, yang dimana berdampak pada berkurangnya waktu luang dan terjadi penambahan pada jam kerja (Borjas, 2016).

2.2. Pengangguran

Pengangguran merupakan suatu masalah atau kendala dalam makro ekonomi yang secara langsung dapat memengaruhi seorang individu menjadi permasalahan terberat (Prabosiwi, 2016). Menurut (Yehosua, 2019) pengangguran merupakan salah satu bentuk permasalahan di lingkup makro ekonomi yang merupakan faktor yang menghambat proses pembangunan dalam suatu daerah karena memiliki dampak yang negatif pada permasalahan sosial lainnya. Kurangnya lowongan pekerjaan mengakibatkan banyaknya angkatan kerja yang menjadi pengangguran, serta tidak berpenghasilan. Pengangguran memperlihatkan sumber daya yang terbuang dan tidak dimanfaatkan secara efektif. Pengangguran-pengangguran tersebut memiliki kemampuan atau potensi untuk dapat berkontribusi pada pendapatan nasional negara, namun mereka belum bisa melakukannya. Menurut (Mankiw, 2018) seorang individu yang sedang dalam proses menunggu pemanggilan untuk bekerja oleh perusahaan tempat dia pernah bekerja dulu dan telah diberhentikan oleh perusahaan tersebut disebut juga pengangguran.

2.3. Pendidikan

Pendidikan adalah perwujudan dari beragam usaha yang bisa membantu guna menaikkan tingkat kecerdasan, kapabilitas, keterampilan/skill, dan juga merupakan segala

aktivitas yang dikerjakan guna mempertahankan dan mengembangkan kapabilitas seorang pegawai yang dibutuhkan dalam dunia kerja guna terciptanya kerja yang efektif dalam suatu organisasi, yang dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti pengembangan karir, pendidikan, ataupun pelatihan khusus (Suwatno & Priansa, 2013). Investasi di lingkup bidang modal manusia diibaratkan atau digambarkan layaknya sebagai investasi yang bersifat konvensional dalam modal fisik yang dimana modal manusia turut serta memiliki peran dalam proses peningkatan kemampuan suatu negara untuk menciptakan atau suatu barang atau jasa dan keberhasilan suatu ekonomi dalam jangka waktu yang panjang (Mankiw, 2018). Taraf pendidikan yang tinggi akan memperbesar dan memperluas peluang bekerja yang dapat diperoleh atau dicapai dan keadaan ini dapat membantu menurunkan angka pengangguran (Suhendra & Wicaksono, 2016).

2.4. Upah

Tingkat upah merupakan taraf atau banyaknya harga yang harus diberikan pada pekerja, yang dimana dipengaruhi dan ditentukan oleh permintaan tenaga kerja yang sumber utamanya merupakan penduduk pada kelompok usia produktif atau usia kerja. Ketika jumlah penduduk meningkat, permintaan tenaga kerja meningkat, lantas upah pada perusahaan bakal menekan pada upah tersebut, begitu juga dengan sebaliknya (Sholeh, 2012). Teori Efisiensi menyatakan bahwa semakin tinggi pemberian upah maka memiliki dampak berupa meningkatnya produktivitas tenaga kerja, serta skill seorang pekerja bergantung pada besar atau tidaknya suatu perusahaan memberi upah kepada pekerjanya (Angga & Fikriah, 2020). Prinsip kebijakan upah minimum bertujuan sebagai bentuk upaya dalam membantu kesejahteraan tenaga kerja atau buruh dalam menerima penghasilan yang layak dengan menilai beberapa pertimbangan, namun tetap memperhatikan produktivitas, serta progres perusahaan dan perkembangan ekonomi secara umum (Rumokoy et al., 2021).

2.5. Kependudukan

Berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 26 Ayat 2, dapat diartikan bahwa penduduk merupakan seluruh warga negara Indonesia serta orang asing yang menempati daerah di Indonesia. Penduduk di dalam suatu negara dapat diartikan sebagai individu yang menempati wilayah tersebut dan individu yang memiliki hak untuk bertempat tinggal di wilayah tersebut yang sah secara hukum (Bidarti, 2020). Menurut (Ganie 2017) berpendapat bahwa seiring dengan terjadinya penambahan pada sumber daya produksi, seperti sumber daya alam seharusnya berbanding lurus dengan terjadinya peningkatan jumlah penduduk. Namun, pada kenyataannya ketersediaan akan sumber daya alam baik pada bagian kuantitas maupun kualitasnya cenderung tidak sesuai dan sebaliknya terus terjadi peningkatan pada jumlah penduduk.

2.6. Hubungan Pendidikan Terhadap Pengangguran

Hubungan antara taraf pendidikan dengan taraf pengangguran ialah taraf pendidikan dapat menentukan situasi kerja individu dikarenakan individu dengan taraf pendidikan yang lebih tinggi cenderung mencari pekerjaan yang lebih berkualitas untuk mencari nafkah dan sebaliknya. Bisa juga menurunkan tingkat pengangguran. Selain itu, keadaan menganggur orang yang berpendidikan tinggi tidak seburuk orang yang

berpendidikan rendah dan ia juga dapat memperoleh penghasilan sesuai batas upah minimum.

Pendidikan merupakan satu dari berbagai hal yang dapat menentukan masyarakat agar dapat bersaing dalam dunia kerja. Lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pendidikan bagi seseorang akan mempengaruhi tingkat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut. Tingginya mutu pendidikan memiliki pengaruh penting dimana tingkat pendidikan tinggi akan membantu meningkatkan tenaga kerja yang diserap. Hal ini dikarenakan korporasi cenderung memilih pekerja yang mempunyai pendidikan tinggi serta kemampuan yang mencukupi (Ganie, 2017).

2.7. Hubungan Upah Minimum Terhadap Pengangguran

Hubungan antara upah minimum dan taraf pengangguran dalam suatu ketenagakerjaan, yaitu besarnya upah yang diberikan akan berpengaruh terhadap penawaran tinggi pada tenaga kerja, sehingga dapat diartikan bahwa pemberian upah yang besar pada tenaga kerja dapat meningkatkan kemauan atau kesediaan masyarakat kelompok usia kerja untuk memperoleh pekerjaan tersebut. Upah memiliki pengaruh dan peranan penting dalam proses penawaran tenaga kerja. Perusahaan yang memberikan upah dengan nilai yang tinggi akan menarik minat para pencari kerja sehingga akan lebih banyak pencari kerja yang berusaha untuk mendapatkan posisi pekerjaan yang ditawarkan pada perusahaan tersebut.

Diduga upah minimum berdampak pada meningkatnya angka pengangguran. Penetapan upah minimum mempengaruhi fenomena tingkat pengangguran. Tingginya tingkat upah minimum mengakibatkan permintaan akan tenaga kerja semakin menurun. Sederhananya, semakin tinggi upah minimum, semakin banyak pengangguran (Suhendra dan Wicaksono 2016).

2.8. Hubungan Jumlah Penduduk Terhadap Pengangguran

Kesenjangan yang terjadi antara kuantitas masyarakat berusia kerja yang tinggi dan kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan mengakibatkan munculnya pengangguran. Penduduk usia kerja yang berasal dari daerah banyak yang berpindah ke daerah perkotaan dengan tujuan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Hal ini menjadi faktor pengangguran di Kota semakin banyak karena ketatnya persaingan yang terjadi antara para pencari kerja. Untuk mencapai keadaan yang seimbang antara penawaran tenaga kerja dan lapangan pekerjaan, maka para pekerja harus tertampung dalam suatu pekerjaan yang disesuaikan dan memenuhi kriteria yang diperlukan baik dalam hal keterampilan, ilmu, dan pengetahuan, tetapi dengan lapangan kerja yang merata di Kota maupun daerah.

Menurut (Lindiarta, 2014) Keterkaitan antara jumlah penduduk dan tingkat pengangguran dapat diamati dari teori penawaran dan permintaan tenaga kerja. Selain itu, Malthus juga memiliki pendapat bahwa terdapat keterkaitan antara jumlah penduduk, upah riil, dan inflasi yang dimana ketika jumlah penduduk bertambah dengan pesat dibandingkan laju produksi pangan, tingkat upah riil menurun sehingga dapat memengaruhi tingkat pengangguran. Namun, jika adanya kenaikan pada upah riil maka korporasi akan melakukan pengurangan tenaga kerja, sementara penawaran pekerja melebihi permintaannya mengakibatkan peningkatan taraf pengangguran (Lindiarta, 2014).

2.9. Kajian Empiris

Dalam penelitian Tumilar, dkk (2022) variabel bebasnya adalah jumlah penduduk, pendidikan dan upah minimum, serta variabel terikatnya yaitu. tingkat pengangguran terbuka. Tempat tersebut terletak di kabupaten/kota provinsi Kalimantan Timur. Perolehan penelitian memperlihatkan bahwa pada kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Timur upah minimum dan jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran, sedangkan tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka.

Dalam penelitian Fina, dkk (2021) variabel bebasnya adalah tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum dengan tingkat pengangguran sebagai variabel terikat, yang memperlihatkan bahwa hasil tingkat pendidikan dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan positif dan berdampak besar pada tingkat pengangguran. Upah minimum tidak memiliki pengaruh. Sementara itu, pendidikan, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum secara signifikan mempengaruhi tingkat pengangguran di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan.

Dalam penelitian Khotimah (2018), variabel bebasnya ialah tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, angkatan kerja dan upah minimum dengan variabel terikatnya ialah tingkat pengangguran. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran, sedangkan angkatan kerja dan upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Kemudian tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, angkatan kerja dan upah minimum secara bersamaan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian yang dilakukan Sembiring & Sasongko, (2019) memiliki variabel independen produk domestik regional bruto, inflasi, upah minimum, dan jumlah penduduk dengan variabel dependen pengangguran menunjukkan hasil pada jumlah penduduk memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengangguran di Indonesia.

Pada penelitian Malangkas, dkk (2022) memiliki variabel independen jumlah penduduk dan upah minimum dengan variabel dependen pengangguran menunjukan bahwa variabel upah signifikan terhadap pengangguran. Variabel jumlah penduduk memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam penelitian oleh Mouren, dkk (2022) tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk merupakan variabel bebas bersama-sama dengan variabel terikat pengangguran, menunjukkan bahwa pendidikan dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap pengangguran, sedangkan jumlah penduduk berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pengangguran. Pendidikan, pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk yang bersamaan berdampak signifikan terhadap angka pengangguran di wilayah Kabupaten Toraja Utara.

Dalam penelitian Pramudjasi, dkk (2019) jumlah penduduk, pendidikan dan upah merupakan variabel bebas dengan pengangguran sebagai variabel terikat. Tempat tersebut terletak di Kabupaten Paser. Menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat pengangguran. Pendidikan tidak berpengaruh secara

signifikan dan positif terhadap tingkat pengangguran. Upah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat pengangguran.

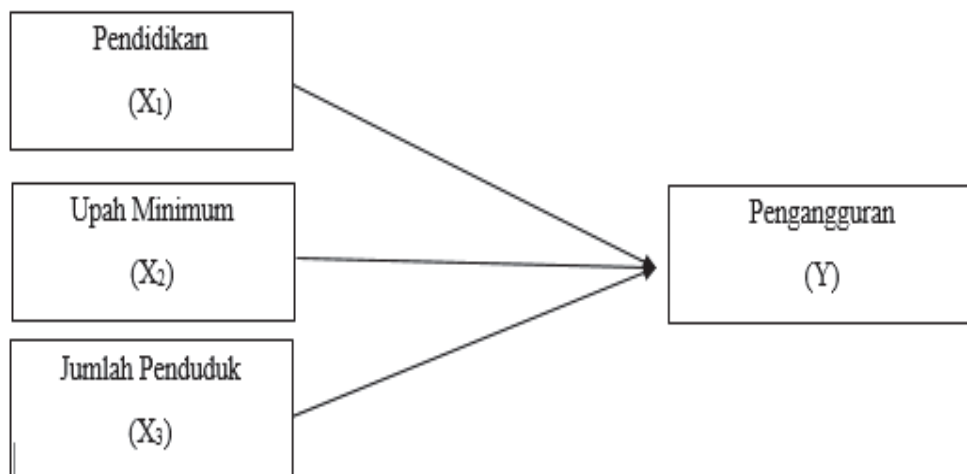
Dalam penelitian Astrid & Soekapdjo (2020) variabel bebas inflasi, jumlah penduduk, IPM, PMA dan PMDN serta variabel terikat pengangguran menunjukkan hasil bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran, dimana hasil jumlah penduduk tidak signifikan dan negatif di Indonesia.

Dalam penelitian Suhaidi & Setyowati (2022) variabel bebasnya adalah pendidikan, upah minimum, dan produk domestik regional bruto dengan variabel terikat adalah pengangguran terbuka. Tempat ini terletak di provinsi Jawa Barat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan, upah minimum dan produk domestik regional bruto secara parsial berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat pengangguran, sedangkan variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap variabel tingkat pengangguran.

Dalam penelitian Sirait & Marhaeni (2013) variabel bebas pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan tingkat pendidikan dengan variabel terikat pengangguran menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, upah minimum regional dan tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengangguran. Secara parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan positif, upah minimum regional berpengaruh signifikan dan negatif terhadap jumlah pengangguran, sedangkan tingkat pendidikan berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap jumlah pengangguran di kabupaten/kota Provinsi Bali.

2.10. Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian

Kerangka konseptual yang diterapkan pada penelitian ini bisa ditinjau pada gambar:



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

2.11. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual penelitian ini, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H_1 : Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Pengangguran di Kalimantan Barat.
- H_2 : Upah Minimum berpengaruh tidak signifikan terhadap Pengangguran di Kalimantan Barat.
- H_3 : Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Pengangguran di Kalimantan Barat.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini ialah penelitian kuantitatif yakni penelitian yang menggunakan data numerik yang pengolahannya menggunakan metode statistik. Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif, maka akan didapatkan hubungan antar variabel yang menunjukkan hubungan sebab dan akibat. Penelitian akan dilakukan pada daerah di Kalimantan Barat yang meliputi 14 Kabupaten dan Kota dengan jangka waktu 5 tahun, yakni dari tahun 2017-2021 dengan menerapkan data panel.

Data penelitian ini ialah data panel yang terbentuk dari gabungan data *time series* periode 2017-2021 dan data *cross section* menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Data *time series* yaitu data yang digunakan dalam jangka waktu lima tahun. Sedangkan data *cross section* adalah data yang dihitung berdasarkan kabupaten/kota di Kalimantan Barat.

Definisi operasional merupakan pengertian pada suatu variabel dengan memberikan informasi tentang cara mengukur variabel tersebut.

1. Variabel Terikat (Y)

Pengangguran ialah persentase dari angkatan kerja yang tidak mempunyai profesi. Data pengangguran yang digunakan pada penelitian ini ialah persentase Tingkat Pengangguran Terbuka menurut 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017 sampai dengan 2021 (dalam satuan persen).

2. Variabel Bebas (X_1 , X_2 , dan X_3)

Variabel bebas pada penelitian ini ialah Pendidikan, Upah Minimum dan Jumlah Penduduk.

a. Pendidikan

Pendidikan ialah sebuah proses yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kapabilitas, wawasan, kemandirian serta menciptakan kepribadian individu. Pada penelitian ini, data yang digunakan ialah rata-rata lama sekolah dari usia 15 tahun ke atas berdasarkan pendidikan terakhir yang diselesaikan di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017 - 2021 (dalam satuan tahun).

b. Upah Minimum

Upah minimum ialah bayaran yang diberikan dan berjalan sesuai peraturan atau kesepakatan kerja bagi karyawan dengan masa kerjanya dalam suatu perusahaan terkait dalam kurun waktu kurang dari satu tahun. Upah yang diberikan pada seorang pekerja atau buruh yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 tahun dapat dirundingkan antara pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan dengan pemberi kerja. Pada penelitian ini data yang diterapkan berupa data upah minimum di setiap

14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017 sampai dengan 2021 (dalam satuan rupiah).

c. Jumlah Penduduk

Penduduk ialah total keseluruhan individu yang menempati dan tinggal pada suatu daerah di wilayah Republik Indonesia dalam kurun waktu 6 bulan atau lebih, serta seluruh individu yang menempati suatu daerah di wilayah Republik Indonesia dengan kurun waktu <6 bulan, tapi mempunyai tujuan untuk tinggal dengan satuan penduduk. Penduduk di dalam penelitian ini, yaitu keseluruhan penduduk yang telah memasuki usia kerja yang merupakan penduduk dalam rentang usia umur 15 tahun atau lebih, dan dalam hal ini termasuk ke dalam angkatan kerja ataupun bukan angkatan kerja. Data jumlah keseluruhan penduduk yang digunakan, yaitu menggunakan data dari jumlah total penduduk dengan rentang usia 15 tahun atau lebih pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017 sampai dengan 2021 (dalam satuan jiwa).

Penelitian ini menerapkan analisis regresi linier berganda dalam menjalankan pengujian terhadap hipotesis penelitian. Dalam memperhatikan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, yaitu pengaruh pendidikan, upah minimum, dan jumlah penduduk terhadap pengangguran di Provinsi Kalimantan Barat periode 2017-2021. Adapun model regresi liner berganda pada penelitian sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e$$

Dimana:

Y = Pengangguran

β_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi Variabel

X₁ = Pendidikan

X₂ = Upah Minimum

X₃ = Jumlah Penduduk

e = Variabel Pengganggu (*Error term*)

i = Jumlah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat

t = Subskripsi waktu (2017-2021)

Untuk menilai dan mendapatkan gambaran apakah terdapat pengaruh atau tidaknya dari variabel dependen dan variabel independen, maka dapat dilakukan Analisis Regresi Linier Berganda. Dalam regresi variabel independennya terdiri dari dua atau lebih, regresi tersebut dinamakan regresi berganda. Variabel pada penelitian ini terdiri dari tiga variabel, sehingga menggunakan regresi berganda. Dalam persamaan regresi yang tertera yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendidikan, upah minimum, dan jumlah penduduk terhadap pengangguran di Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam menganalisis data panel digunakan tiga model regresi, diantaranya :

1) *Common Effect Model*

Common Effect Model ialah bentuk model hasil penggabungan data *time series* dan data *cross section*, dengan tidak mempertimbangkan selisih antara waktu dan individu tetap.

2) *Fixed Effect Model*

Fixed Effect Model ialah suatu model yang menganggap terdapat perbedaan konstanta dengan koefisien regresi yang sama. Yang mempunyai konstanta pada suatu objek dengan besar yang tetap untuk waktu yang berbeda, serta koefisien regresi tetap besar dari masa ke masa.

3) *Random Model Effect*

Random Model Effect yaitu model yang dapat memecahkan kekurangan pada *Fixed Effect Model* dan merupakan suatu model yang menggunakan variabel yang bersifat semu. Oleh karena itu, model ini bersifat tahan dari ketidakpastian dan dapat mengestimasi data panel dengan variabel gangguan terkait antar individu.

Dalam memilih model data panel, dibutuhkan uji ekonometrika menggunakan bantuan aplikasi *Eviews 9*.

1. Uji *Chow*

Tujuan dari uji ini adalah mencari gambaran dan menilai secara probabilitas apakah *fixed model effect* merupakan model yang terbaik, apabila nilainya kurang dari taraf signifikan 0,05, sehingga *fixed effect model* merupakan model terbaik. Di sisi lain, apabila lebih besar dari 0,05, sehingga perlu pengujian lewat model lainnya.

2. Uji *Hausman*

Uji ini dipakai dalam perbandingan *fixed effect model* dan *random effect model* untuk membandingkan dan menilai manakah model yang lebih menarik yang dapat dipakai menjadi model regresi data panel juga memandang hasil nilai probabilitas pada uji *hausman*. Apabila nilai probabilitas kurang dari taraf signifikan 0,05, maka *fixed effect model* dipilih, dan sebaliknya apabila lebih besar dari 0,05, maka *random effect model* yang dipilih.

3. Uji *Lagrange Multiplier (LM)*

Tujuan dari uji ini adalah menilai kedua model antara *common effect model* dan *random effect model* dengan cara melihat nilai probabilitasnya apakah lebih besar dari 0,05 atau sebaliknya, apabila lebih kecil dari 0,05 maka H_1 diterima.

Setelah model terbaik untuk digunakan ditentukan, dilakukan uji statistik menggunakan *Eviews 9*, yaitu:

1. Uji F

Tujuan uji ini ialah untuk menilai apakah terdapat pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Adapun ketentuan dalam Uji F :

- a. Nilai probabilitas $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak
- b. Nilai probabilitas $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima

2. Uji Parsial t

Tujuan dari uji ini ialah mengukur dan menilai apakah setiap variabel independen atau salah satu variabel independen secara individual bersifat signifikan terhadap variabel dependen. Serta mendeteksi apakah terdapat pengaruh atau tidak, dapat diketahui dari nilai signifikan 0,05. Adapun kriterianya, yaitu :

- a. Apabila probabilitas $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak

- b. Apabila probabilitas $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima
3. Uji Koefisien Determinan R^2
Tujuan pengujian ialah untuk menilai apakah model persamaan regresi cocok untuk kombinasi variabel yang perubahan variabelnya dijelaskan oleh model yang baik, yaitu model dengan memiliki hasil adjusted R^2 mendekati 1.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas
Tujuan dari pengujian ini untuk melihat normal atau tidaknya pendistribusian suatu data. Pengujian ini dilakukan pada residual dan tidak dilakukan pada setiap variabel.
2. Uji Multikolinearitas
Tujuan pengujian ini untuk melihat apakah terdapat korelasi pada variabel bebas dengan model regresi linier berganda. Apabila didapat korelasi tinggi antara variabel independen, maka hubungan antara variabel independen dan variabel dependen terputus.
3. Uji Heteroskedastisitas
Tujuan pengujian ini untuk melihat ada tidaknya ketidaksamaan pada varian residual pada setiap pengamatan.
4. Uji Autokorelasi
Tujuan pengujian untuk melihat dan menilai ada tidaknya korelasi suatu periode dengan periode sebelumnya. Autokorelasi dapat ditunjukkan dengan Uji *Durbin-Watson*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah untuk menguji dan menganalisis pengaruh pendidikan, upah minimum dan jumlah penduduk terhadap pengangguran di kabupaten/kota provinsi Kalimantan Barat. Instrumen kajian yang diterapkan pada penelitian ini yaitu regresi linier berganda dengan menggunakan data panel selama periode 5 tahun, dari tahun 2017 hingga tahun 2021.

4.1.1. Pemilihan Model Estimasi Data Panel

Pada analisis regresi data panel di gunakan model *common effect model*, *fixed effect model*, dan *random effect model*. Guna menetapkan model yang pas, maka dilaksanakan uji *chow*, uji *hausman*, dan uji *lagrange multiplier* terlebih dahulu.

1. Uji Chow

Pada uji *chow* dilakukan guna menentukan model terbaik yang bisa diterapkan sebagai model regresi data panel dengan melihat perbandingan *model common effect* dengan *model fixed Effect*. Berikut hasil pada uji *chow*, *hausman*, dan *lagrange multiplier*.

Berdasarkan pada tabel 4.1 diketahui perolehan hasil pada uji *chow* mempunyai nilai probabilitas senilai 0,0000, yang dimana nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi yang sudah ditentukan senilai 0,05. Sehingga model yang terpilih *fixed effect model* lebih baik dibandingkan *common effect model*. Kemudian uji *hausman* dilaksanakan untuk menetapkan model yang terbaik diterapkan sebagai model regresi data panel dengan menjalankan komparasi *fixed effect model* dengan *random effect model*.

Tabel 4.1
Hasil Uji Chow, Uji Hausman, Uji Lagrange Multiplier

Uji	Probabilitas	Hasil
Uji Chow	0.0000	<i>Fixed Effect Model</i>
Uji Hausman	0.9204	<i>Random Effect Model</i>
Uji Lagrange Multiplier	0.0000	<i>Random Effect Model</i>

Sumber: Hasil olah data melalui Eviews 9

Berdasarkan tabel 4.1, diketahui perolehan dari uji *hausman* didapatkan nilai probabilitas sebesar 0,9204 nilainya lebih besar dari 0,05. Maka, *model random effect* lebih baik untuk digunakan dibandingkan dengan *common effect model*. Berdasarkan uji tersebut didapatkan model terbaik untuk diterapkan dalam penelitian ini ialah *random effect model* dan Berdasarkan *uji Lagrange Multiplier* (LM) didapatkan hasil pada nilai *both* pada uji *Lagrange Multiplier* adalah 0,0000 ini membuktikan bahwa nilai *both* lebih kecil dari 0,05 sehingga bisa di nyatakan *model random effect* merupakan model yang terbaik dan sesuai untuk digunakan dengan keyakinan sebesar 95%.

4.1.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari uji *chow*, uji *hausman*, dan uji *lagrange multiplier* didapatkan model persamaan regresi yang digunakan yaitu *model random effect* yang ditentukan dari hasil olahan aplikasi Eviews 9. Berikut ini merupakan hasil dari regresi berganda dari *model random effect*.

Tabel 4.2
Hasil Regresi Linier Berganda Model Random Effect

Dependent Variable: Y Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 02/22/23 Time: 06:59 Sample: 2017 2021 Periods included: 5 Cross-sections included: 14 Total panel (balanced) observations: 70 Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PENGANGGURAN	-0,097096	0,210055	-0,462241	0,6454
PENDIDIKAN	0,019425	0,004942	3,930395	0,0002
UPAH MINIMUM	0,000866	0,015211	0,056926	0,9548
JUMLAH PENDUDUK	-0,001477	0,001708	-0,865066	0,3901

Sumber: Hasil olah data melalui Eviews 9

Berikut interpretasi dari persamaan di atas:

- a. Berdasarkan hasil regresi, konstanta senilai -0,097096, bermakna bahwa nilai tersebut memiliki arti jika pendidikan, upah minimum, dan jumlah penduduk mengalami perubahan, maka pengangguran meningkat sebesar -0,097096.
- b. Berdasarkan hasil regresi diperoleh nilai koefisien pendidikan sebesar 0,019425 bermakna bahwa apabila pendidikan mengalami kenaikan 1 tahun, maka tingkat pengangguran akan bertambah sebesar 0,019425.
- c. Berdasarkan hasil regresi diperoleh nilai koefisien upah minimum sebesar 0,000866 bermakna bahwa apabila upah minimum mengalami kenaikan 1 tahun, maka tingkat pengangguran akan bertambah sebesar 0,000866.
- d. Berdasarkan hasil regresi diperoleh nilai koefisien jumlah penduduk sebesar -0,001477 bermakna bahwa apabila jumlah penduduk mengalami kenaikan 1 tahun, maka tingkat pengangguran akan mengalami penurunan sebesar -0,001477.

4.1.3 Uji Hipotesis

Dalam pengujian hipotesis menggunakan 3 pengujian yang dilakukan yaitu uji koefisien determinasi (R^2), uji F, dan uji t. Berikut ialah hasil dari uji R^2 yang bertujuan untuk melihat kemampuan atau besaran proporsi dan hasil uji F yang bertujuan untuk melihat ketepatan model regresi.

Tabel 4.3
Hasil Uji Koefisien Determinasi R^2

Keterangan	Probabilitas dan Nilai
R-squared	0,249160
Prob(F-statistic)	0,000267

Sumber: Hasil olah data melalui *Eviews 9*

Berdasarkan data tabel 4.3 memperlihatkan perolehan hasil dari uji koefisien determinasi (R^2) yaitu 0,249160 hal ini menandakan kemampuan pendidikan, upah minimum, dan jumlah penduduk dalam mempengaruhi pengangguran sebesar 75,09 persen sedangkan sisanya dengan nilai sebesar 24,91 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Berdasarkan tabel 4.3 memperlihatkan perolehan hasil dari uji signifikan F dengan nilai probabilitas yaitu 0,000267, dimana angka tersebut lebih kecil dibandingkan dengan nilai taraf signifikan 0,05. Oleh karena itu, ditarik kesimpulan variabel pendidikan, upah minimum, jumlah penduduk berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap pengangguran.

4.1.3.1. Uji Signifikan t

Pada uji t dilakukan guna menguji apakah hipotesis yang telah di buat dalam penelitian mengenai pengaruh variabel bebas pendidikan, upah minimum, dan jumlah penduduk signifikan atau tidaknya berpengaruh terhadap variabel terikat pengangguran di kabupaten/kota provinsi Kalimantan Barat.

Tabel 4.4
Hasil Uji Signifikan t

Variabel	t-Statistik	Probabilitas	Hasil
Pendidikan	3,930395	0,0002	Signifikan
Upah Minimum	0,056926	0,9548	Tidak Signifikan
Jumlah Penduduk	-0,865066	0,3901	Tidak Signifikan

Sumber: Hasil olah data melalui *Eviews 9*

Berdasarkan tabel 4.4 yang menunjukkan hasil uji signifikan t maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Pendidikan, dengan nilai t-statistik yaitu 3,930395 dan nilai probabilitas sebesar 0,0002 lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu 0,05. Maka, pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran di Kalimantan Barat. Penjelasananya jika pendidikan mengalami peningkatan 1 tahun maka pengangguran mengalami peningkatan sebesar 3,930395.
- Upah Minimum, dengan nilai t-statistik yaitu 0,056926 dan nilai probabilitas sebesar 0,9548 lebih besar dari tingkat signifikansi yaitu 0,05. Maka, upah minimum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengangguran di Kalimantan Barat. Penjelasananya jika upah minimum mengalami peningkatan 1 tahun maka pengangguran mengalami peningkatan sebesar 0,056926.
- Jumlah Penduduk, dengan nilai t-statistik yaitu -0,865066 dan nilai probabilitas sebesar 0,3901 lebih besar dari tingkat signifikansi yaitu 0,05. Maka, jumlah penduduk berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran di Kalimantan Barat. Penjelasananya jika jumlah penduduk mengalami peningkatan 1 tahun maka pengangguran mengalami penurunan sebesar 0,8650.

4.1.4 Uji Asumsi Klasik

4.1.4.1. Uji Normalitas dan Uji Heteroskedastisitas

Dalam uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah suatu variabel bebas dan variabel terikat memiliki distribusi normal atau tidak normal yang dilihat dari nilai Prob Jarque Bera. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian variabel satu ke variabel lainnya.

Tabel 4.5
Hasil Uji Normalitas dan Uji Heteroskedastisitas

Keterangan dan Variabel	Probabilitas
Prob Jarque-Bera	0,195594
Pendidikan	0,3928
Upah Minimum	0,1703
Jumlah Penduduk	0,1561

Sumber: Hasil olah data melalui *Eviews 9*

Berdasarkan hasil pada tabel 4.5 didapatkan hasil untuk uji normalitas memiliki nilai probabilitas jarque-bera lebih besar dari tingkat signifikansi yaitu 0,05. Dengan nilai probabilitas yang sebesar $0,195594 > 0,05$, maka pada penelitian ini data berdistribusi normal.

Sedangkan untuk hasil uji heteroskedastisitas tidak didapatkan variabel bebas yang mengalami masalah heteroskedastisitas, karena semua variabel bebas memiliki nilai probabilitas lebih besar dari 0,05.

4.1.4.2. Uji Multikolinearitas

Dalam uji multikolinearitas memiliki tujuan untuk menguji apakah model regresi yang di dapat memiliki hubungan antar variabel bebas. Apabila terjadi korelasi diantaranya, maka model regresi tersebut dinyatakan mengalami masalah multikolinearitas.

Tabel 4.6
Hasil Uji Multikolinearitas

Keterangan	Pendidikan	Upah Minimum	Jumlah Penduduk
Pendidikan	1,000000	0,103819	0,512274
Upah Minimum	0,103819	1,000000	-0,134927
Jumlah Penduduk	0,512274	-0,134927	1,000000

Sumber: Hasil olah data melalui *Eviews 9*

Berdasarkan hasil yang didapat pada tabel 4.6 memperlihatkan hasil untuk uji multikolinearitas yang dimana pada nilai koefisien korelasi antar variabel independen $< 0,8$. Nilai koefisien korelasi kurang dari 0,8 yang berarti tidak ada korelasi atau hubungan antar variabel independen. Hal ini memperlihatkan model regresi pada penelitian ini baik, dikarenakan tidak berkorelasi dan bebas dari masalah multikolinearitas.

4.1.4.3. Uji Autokorelasi

Tabel 4.7
Hasil Uji Autokorelasi

<i>Durbin-Watson stat</i>	1,583512
---------------------------	----------

Sumber: Hasil olah data melalui *Eviews 9*

Berdasarkan tabel 4.7, diperoleh nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,583512 yang di mana pada analisis autokorelasi tidak terjadi apabila nilai D-W berada di antara -2 sampai +2, yang berarti tidak ada autokorelasi. Oleh karena itu, nilai autokorelasi yang didapatkan lebih besar daripada -2 dan kecil dari +2 sehingga diperoleh kesimpulan bahwa hasil ini terbebas dari masalah autokorelasi.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pengaruh Pendidikan Terhadap Pengangguran

Berdasarkan perolehan penelitian memperlihatkan bahwa pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran di kabupaten/kota provinsi Kalimantan Barat. Perolehan ini selaras dengan hipotesis yang telah ditentukan dalam penelitian yang menyebutkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pengangguran. Dari perolehan uji signifikan t diperoleh nilai signifikansi senilai $0,0002 < 0,05$. Secara teori, tingkat pendidikan memiliki pengaruh pada menurunnya angka pengangguran. Untuk dapat melihat dan menilai sumber daya manusia yang terdapat di suatu wilayah bisa dilakukan dengan melihat tingkat pendidikan yang diselesaikannya. Sumber daya manusia yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dipersepsikan mempunyai mutu yang lebih baik. Selain itu, tenaga kerja yang mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang baik juga dapat untuk menciptakan lapangan kerja sendiri sehingga bisa memperluas peluang kerja, dan dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat membantu menurunkan angka pengangguran. Namun, penelitian ini memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di kabupaten/kota provinsi Kalimantan Barat tahun 2017 hingga tahun 2021. Hal ini tidak sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa dengan tingginya angka melek huruf pada suatu wilayah maka dapat membantu menurunkan angka pengangguran. Keadaan di Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan data angka melek huruf dari tahun 2017-2021 memiliki nilai rata-rata 99,81 persen.

Tabel 4.8
Angka Melek Huruf di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017-2021

Provinsi	2017	2018	2019	2020	2021
Kalimantan Barat	99,68	99,79	99,84	99,86	99,87

Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat (2023)

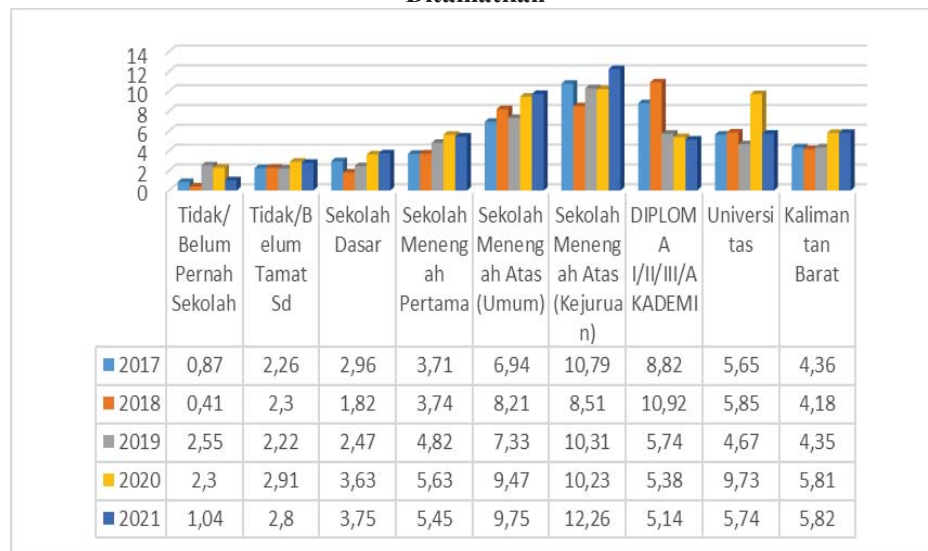
Berdasarkan data pada tabel 4.8, dapat diketahui bahwa keadaan angka melek huruf di Provinsi Kalimantan Barat tergolong tinggi. Berdasarkan data angka melek huruf di Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2017-2021 memiliki nilai rata-rata 99,81 persen. Hal ini menandakan bahwa angka melek huruf yang semakin tinggi di Kalimantan Barat masih memiliki potensi untuk meningkatkan angka pengangguran.

Kondisi pendidikan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat juga masih belum merata di tiap kabupaten/kotanya, yang di mana pada tabel 1.2 memperlihatkan rata-rata lama sekolah yang di tempuh masih rendah, namun cenderung bergerak ke atas yang mengindikasikan pendidikan yang perlahan mulai meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2021, rata-rata lama sekolah yang ditamatkan terlama terjadi di Kota Pontianak yaitu 10,43 tahun, sedangkan di beberapa daerah seperti Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Bengkayang memiliki rata-rata lama sekolah hanya 6,02 tahun dan 6,80 tahun. Hal ini memperlihatkan ketimpangan lama pendidikan yang ditamatkan di Kota Pontianak dan Kabupaten Kayong Utara disebabkan oleh fasilitas sarana prasana pendidikan formal yang

kurang memadai, permasalahan ekonomi dan kurangnya motivasi untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Barat cenderung berbeda-beda di tiap Kabupaten/Kota karena faktor-faktor tersebut.

Namun, secara informal penduduk yang mempunyai pendidikan yang tinggi cenderung untuk memilih pekerjaan yang dimana menginginkan profesi yang selaras dengan taraf pendidikan yang diperolehnya. Sehingga, konsep tentang semakin tinggi pendidikan maka semakin mudah untuk mendapatkan pekerjaan tidak berlaku dikarenakan dengan adanya budaya pemikiran tersebut yang membuat angka pengangguran semakin meningkat.

Tabel 4.9
Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan



Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat (2023)

Berdasarkan data pada tabel 4.9 memperlihatkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2017 sampai dengan 2021, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2021 sebesar 5,82. Dapat di lihat dari karakteristiknya, pengangguran di Kalimantan Barat dominasi oleh tamatan SMA dan SMK. Kondisi ini memperlihatkan penduduk yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi lebih dominan menganggur.

Berdasarkan hasil uji, dapat diketahui bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Fina, dkk, (2021) di Kabupaten Minahasa Selatan, Tumilar, dkk (2022) di Provinsi Kalimantan Timur, dan Khotimah (2018) di DIY yang menyatakan pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan temuan Suhaidi & Setyowati (2022) di Provinsi Jawa Barat yang menyatakan pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan dan temuan Pramudjasi, dkk (2019) di Kabupaten Paser yang mengatakan pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan serta penelitian Mouren, dkk (2022) di Kabupaten Toraja Utara dan Sirait &

Marhaeni (2013) di Provinsi Bali yang menyatakan pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan.

4.2.2. Pengaruh Upah Minimum Terhadap Pengangguran

Berdasarkan hasil penelitian upah minimum mempunyai koefisien sebesar 0,056926 dengan nilai probabilitas yang diperoleh sebesar $0,9548 > 0,05$, sehingga dapat diketahui bahwa upah minimum tidak signifikan dan positif terhadap pengangguran di Kalimantan Barat. Dengan demikian, hipotesis yang mengatakan upah minimum berpengaruh tidak signifikan terhadap pengangguran diterima.

Pada Provinsi Kalimantan Barat upah minimum cenderung bergerak ke atas yang mengindikasikan jumlah upah yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini turut diikuti dengan meningkatnya angka pengangguran. Tingginya tingkat upah memiliki pengaruh terhadap meningkatnya jumlah pengangguran. Peningkatan pada biaya produksi seperti upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdampak pada pengurangan jumlah tenaga kerja pada suatu perusahaan untuk menurunkan biaya produksi yang harus dikeluarkan. Selain itu peningkatan pada upah memiliki pengaruh pada investasi. Semakin tinggi upah pada suatu wilayah akan mengakibatkan investor mempertimbangkan untuk melakukan investasi dari dananya. Alghofari (2011) memiliki pendapat bahwa kebijakan pemerintah dalam menetapkan upah dalam suatu negara memiliki pengaruh pada peningkatan tingkat pengangguran, dikarenakan tingkat upah yang ditetapkan semakin meningkat berdampak pada menurunnya jumlah tenaga kerja di suatu negara tersebut.

Dengan tingkat upah minimum yang meningkat, perusahaan akan melakukan efisiensi dengan melakukan pemanfaatan teknologi, sehingga tenaga kerja perlahan mulai tersingkirkan dengan adanya teknologi. Perusahaan melakukan ini dikarenakan perusahaan ingin hasil dari produksi yang di keluarkan tidak berkurang dan kebutuhan konsumsi masyarakat stabil, sehingga perusahaan melakukan penetapan pada harga namun perlahan menggati tenaga kerja dengan menggunakan teknologi yang berdampak pada pengurangan pada tenaga kerja yang membuat pengangguran meningkat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan upah minimum merupakan alat atau instrumen yang diterapkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mempertahankan daya saing. Oleh karena itu, pemerintah juga mempertimbangkan kemampuan perusahaan dalam menentukan upah minimum. Kesepakatan yang terjadi antara dua pihak, yaitu pemerintah dan pengusaha, untuk menetapkan upah minimum tidak menyebabkan kenaikan pada harga tenaga kerja yang signifikan, sehingga hal ini tidak akan menyebabkan kondisi penawaran akan tenaga kerja melebihi permintaan yang di mana hal tersebut dapat menyebabkan peningkatan pada jumlah pengangguran yang ada. Selain itu, kebijakan tersebut juga tidak memengaruhi proses penyerapan tenaga kerja. Kebijakan upah minimum tidak menyebabkan menurunnya atau berkurangnya penyerapan akan tenaga kerja yang diakibatkan oleh terjadinya ketidakseimbangan antara pertumbuhan tenaga kerja dengan penyerapan tenaga kerja.

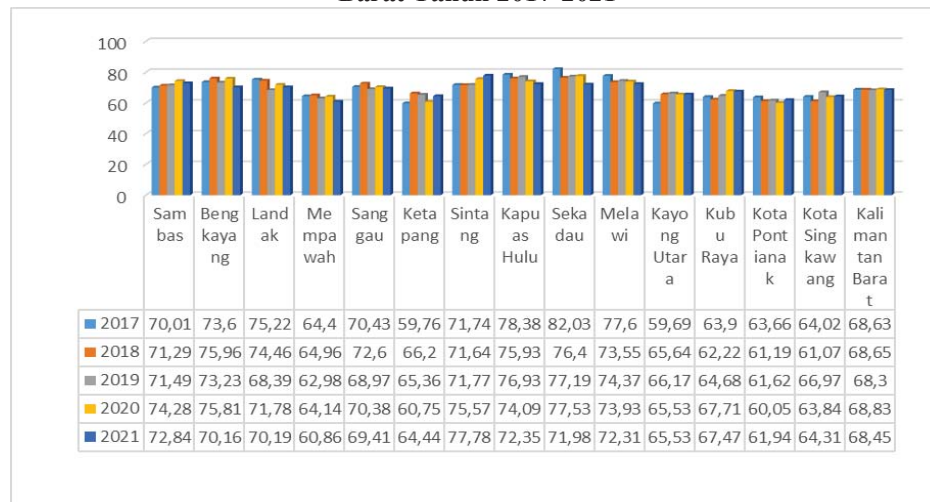
Perolehan penelitian ini selaras dengan temuan Fina, dkk (2021) yang mengatakan upah minimum tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pengangguran terbuka di Kabupaten Minahasa Selatan. Namun, penelitian ini tidak sependapat dengan temuan

Malangkas, dkk (2022) di Provinsi Sulawesi Utara, Pramudjasi, dkk (2019) di Kabupaten Paser, Suhaidi & Setyowati (2022) di Provinsi Jawa Barat, dan Sirait & Marhaeni (2013) di Provinsi Bali yang menyatakan upah minimum memiliki pengaruh signifikan terhadap pengangguran.

4.2.3. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pengangguran

Berdasarkan hasil penelitian jumlah penduduk mempunyai koefisien senilai - 0,865066 dengan nilai probabilitas yang diperoleh adalah $0,3901 > 0,05$, sehingga dapat diketahui bahwa jumlah penduduk tidak signifikan dan berpengaruh negatif terhadap pengangguran di Kalimantan Barat. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis pada penelitian yang mengemukakan adanya pengaruh pada jumlah penduduk terhadap pengangguran. Perolehan penelitian memperlihatkan bahwa jumlah penduduk di Kalimantan Barat cukup besar, namun dengan tingkat pendidikannya yang masih rendah dan belum merata di setiap kabupaten/kotanya sehingga siap untuk bekerja di segala bidang dengan upah yang rendah dan penempatan distribusi masyarakat yang tidak sama. Berikut merupakan persentase dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2017 sampai dengan 2021.

Tabel 4.10
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kab/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2017-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat (2023)

Berdasarkan data dari tabel 4.10 menggambarkan jumlah penduduk dengan rentang usia >15 tahun yang bekerja sebanyak 2.635.760 jiwa di Kalimantan Barat, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 68,45 persen pada tahun 2021. Hal ini dapat memperlihatkan bahwa sekitar 68 dari 100 penduduk yang termasuk usia kerja yaitu 15 tahun keatas atau lebih di Provinsi Kalimantan Barat memiliki keterlibatan secara aktif di dalam pasar tenaga kerja baik dengan status bekerja, mencari pekerja atau menyiapkan bisnis. Dengan kuantitas penduduk yang didominasi oleh usia produktif tidak akan berdampak pada pengangguran, hal ini dikarenakan pada penduduk tersebut mempunyai peluang kerja yang luas untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Hal tersebut dapat ditinjau pada tabel 4.11 yang di mana jumlah penduduk yang bekerja atau berusaha secara mandiri di Kalimantan Barat.

Tabel 4.11
Jumlah Penduduk yang Bekerja Mandiri di Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat
Tahun 2017-2021

Jumlah Penduduk Bekerja Mandiri					
Kab/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Sambas	171.295	178.298	185.786	223.086	212.591
Bengkayang	91.442	95.079	89.885	98.353	90.218
Landak	125.945	119.456	123.921	135.233	134.458
Mempawah	50.252	51.259	55.259	69.857	63.535
Sanggau	154.976	166.407	160.850	177.391	166.684
Ketapang	121.525	120.452	128.811	117.175	128.675
Sintang	142.956	143.223	207.239	173.157	169.972
Kapuas Hulu	98.949	106.367	98.499	90.199	96.654
Sekadau	92.634	82.768	88.225	90.025	79.588
Melawi	74.885	72.802	81.686	79.045	76.200
Kayong Utara	30.956	28.632	31.928	34.466	35.701
Kubu Raya	122.854	117.683	129.976	156.739	159.683
Kota Pontianak	109.976	95.035	119.608	125.301	121.416
Kota Singkawang	90.123	87.974	47.639	53.714	53.063
Kalimantan Barat	1.478.768	1.465.435	1.494.658	1.623.741	1.588.711

Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat (2023)

Pada tabel 4.11 bisa ditinjau bahwa persentase jumlah penduduk yang bekerja secara mandiri di Kalimantan Barat mengalami naik turun atau fluktuatif. Berdasarkan data pada tahun 2021 jumlah penduduk berjumlah 1.588.711 jiwa dan mengalami penurunan dari tahun 2020 yang dimana jumlah penduduk yang bekerja secara mandiri berjumlah 1.623.741 jiwa.

Berdasarkan hasil uji, dapat diketahui jumlah penduduk tidak mempunyai pengaruh terhadap pengangguran di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat. Temuan ini didukung oleh hasil penelitian (Astrid & Soekapdjo, 2020) yang mengatakan jumlah penduduk negatif dan tidak signifikan di Indonesia, kemudian temuan (Sembiring & Sasongko, 2019) yang mengatakan bahwa jumlah penduduk tidak signifikan dan berpengaruh positif terhadap pengangguran di Indonesia, dan temuan (Suhaidi & Setyowati, 2022) yang menyatakan jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh terhadap pengangguran di Provinsi Jawa Barat. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan temuan Tumilar, dkk (2022) di Provinsi Kalimantan Timur, Malangkass, dkk (2022) di Provinsi Sulawesi Utara, dan Mouren, dkk (2022) di Kabupaten Toraja Utara yang mengatakan jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran serta temuan Pramudjasi, dkk (2019) di Kabupaten Paser yang menyatakan jumlah penduduk berdampak signifikan dan positif terhadap pengangguran.

5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian memperlihatkan pendidikan berpengaruh terhadap pengangguran di Kalimantan Barat. Ini disebabkan karena pendidikan merupakan investasi yang penting bagi individu maupun masyarakat, sehingga membuka peluang mendapatkan profesi yang luas untuk orang-orang yang memiliki taraf pendidikan yang lebih tinggi. Namun, hal tersebut tidak disertai dengan ketersediaan peluang kerja. Kemudian, upah minimum dan jumlah penduduk yang tidak berpengaruh terhadap pengangguran di

Kalimantan Barat. Hal tersebut dikarenakan kenaikan pada upah minimum setiap tahunnya tidak begitu berdampak dalam permintaan pekerja dan jumlah penduduk yang didominasi usai produktif tidak akan mempengaruhi tingkat pengangguran.

Adapun rekomendasi atau saran untuk pemerintah yaitu Pemerintah daerah di setiap Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat hendaknya harus melakukan pemerataan serta menyediakan fasilitas sarana prasarana yang baik di tiap daerah di Kalimantan Barat dalam upaya untuk menunjang proses pendidikan guna menghasilkan kualitas pada sumber daya manusia yang terbaik. Bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat melakukan kerja sama dengan pihak lainnya dalam menentukan penetapan upah minimum dan mempertimbangkan kemampuan dari perusahaan serta keperluan hidup bagi pekerja pun perlu dalam memperhitungkan dampak dari tingkat upah. Pemerintah daerah di setiap Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat hendaknya membuat kebijakan yang dapat mendorong pemilik modal untuk membangun berbagai perusahaan baru sehingga berpeluang menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas dan merata. Hal ini dikarenakan Provinsi Kalimantan Barat memiliki potensi sumber daya alam yang kaya, apabila dimanfaatkan dengan baik akan berdampak pada perekonomian di Kalimantan Barat. Diharapkan pada penelitian selanjutnya bisa menambah variabel bebas lain atau menerapkan model kajian yang tidak sama agar perolehan penelitian lebih sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurakhmanov, K., & Zokirova, N. (2013). *Labor Economics and Sociology*. (E. S. Margianti, Ed.) (Tutorial). Gunadarma University, Indonesia.
- Alghofari, F., & Pujiono, A. (2011). Analisis Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 1980-2007. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Dipenegoro*.
- Angga & Fikriah. (2020). Pengaruh Upah Minimum Provinsi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 5(2), 0–5.
- Astrid, E., & Soekapdjo, S. (2020). Pengaruh inflasi, jumlah penduduk, ipm, pma, dan pmdn terhadap tingkat pengangguran di indonesia. *Forum Ekonomi*, 22(2), 319–325. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUMEKONOMI>
- Bidarti, A. (2020). *Teori Kependudukan* (Mukodas (Ed.); Pertama). Lindan Bestari.
- Borjas, G. J. (2016). *Labor Economics* (Seventh). The MacGrow-Hill Companies.
- BPS. (2023). *Angka Melek Huruf di Provinsi Kalimantan Barat 2017-2021*.
- BPS Provinsi Kalimantan Barat. (2023). *Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2020*. Retrieved June 4, 2023, from <https://kalbar.bps.go.id/publication/2022/07/07/669bd64a81533c5a525a3802/keadaan-angkatan-kerja--di-provinsi-kalimantan-barat-agustus-2021.html>
- BPS Provinsi Kalimantan Barat. (2023). Retrieved May 13, 2023, from <https://kalbar.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html>
- BPS Provinsi Kalimantan Barat. (2021). *Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kab/Kota* (p. 1). <https://kalbar.bps.go.id/indicator/26/85/1/rata-rata-lama-sekolah-menurut-kab-kota.html>
- BPS Provinsi Kalimantan Barat. (2022). *Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang*

Termasuk Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kalimantan Barat. BPS.

- BPS Provinsi Kalimantan Barat. (2023a). *Kalimantan Barat Dalam Angka 2017-2021*. <https://kalbar.bps.go.id/publication/2022/02/25/a56f1074cd96425dead3f279/provinsi-kalimantan-barat-dalam-angka-2022.html>
- BPS Provinsi Kalimantan Barat. (2023b). *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat*. <https://kalbar.bps.go.id/indicator/6/50/1/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-tpak-menurut-kab-kota.html>
- BPS Provinsi Kalimantan Barat. (2023c). *Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat*. <https://kalbar.bps.go.id/indicator/6/51/1/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-menurut-kab-kota.html>
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat. (2022). *Upah Minimum Kabupaten/Kota/Provinsi di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 - Datasets - Satu Data Provinsi Kalimantan Barat*. <https://data.kalbarprov.go.id/dataset/upah-minimum-kabupaten-kota-provinsi-di-provinsi-kalimantan-barat-tahun-2022>
- Fina, E., Walewangko, E. N., & Tumangkeng, S. Y. L. T. (2021). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Terhadap Pengangguran di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2009-2019. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(02), 180–190.
- Ganie, D. (2017). Analisis Pengaruh Upah, Tingkat Pendidikan, Jumlah Penduduk Dan Pdrb Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Berau Kalimantan Timur. *Jurnal Eksekutif*, Volume 14(Nomor 2), 332–354.
- Khotimah, K. (2018). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Angkatan Kerja, Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Di Diy Tahun 2009-2015. *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi*, 7, 599–609. <https://www.antaranews.com>
- Lindiarta, A. (2014). Analisis Pengaruh Tingkat Upah Minimum, Inflasi, Dan Jumlah Penduduk terhadap Pengangguran di Kota Malang (1996-2013). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 2(2), 1–15. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1232/1135>
- Malangkas Twaine, Lopian Agnes, & F.Dj.Siwu Hanly. (2022). Pengaruh Upah Minimum Provinsi dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengangguran di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(5), 73–84.
- Mankiw, N. G. (2018). *Pengantar Makro Ekonomi*. Salemba Empat.
- Mouren, V., Agnes Lutherani Ch. P. Lopian, & Steeva Y.L Tumangkeng. (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengangguran Di Kabupaten Toraja Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(1), 131–143.
- Peichl, A., & Sieglöcher, S. (2012). Accounting for Labor Demand Effects in Structural Labor Supply Models. *Labour Economics*, 19(1), 129–138. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.labeco.2011.09.007>
- Prabosiwi, R. (2016). Pengangguran dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah*, 15, 89–100.
- Pramudjasi, R., Juliansyah, & Lestari, D. (2019). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pendidikan serta Upah terhadap Pengangguran di Kabupaten Paser. *Kinerja*, 16(1),

- 69–77. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA/article/view/5284/472>
- Purnami, I. (2015). Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2013. (*Bachelor Essay*) Univesitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30167>
- Rumokoy, D. A., Tampanguma, M. Y., Undang, U., Penulisan, A. L. B., Masalah, B. R., Penelitian, C. M., Hukum, A. P., Tenaga, B., Mendapatkan, U., & Minimum, U. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Dari Tenaga Kerja Untuk Memperoleh Upah Minimum Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Lex Privatum*, IX(6), 211–220.
- Santoso, R. P. (2012). *Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan* (Edisi 1). UPP STIM YKPN.
- Sembiring, V. B. P., & Sasongko, G. (2019). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi, Upah Minimum, dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengangguran di Indonesia Periode 2011 – 2017. *International Journal of Social Science and Business*, 3(4), 430. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i4.21505>
- Sholeh, M. (2012). Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja serta Upah: Teori serta Beberapa Potretnya di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 4(1), 62–75. <https://doi.org/10.21831/jep.v4i1.618>
- Sirait, N., & Marhaeni, A. A. I. N. (2013). Analisis Beberapa Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Jumlah Pengangguran Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2(2), 108–118.
- Suhaidi, F. R., & Setyowati, E. (2022). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk , Pendidikan , Upah Minimum , Dan PDRB Terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ekombis Review – Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(2), 879–888.
- Suhendra, I., & Wicaksono, B. H. (2020). Tingkat Pendidikan, Upah, Inflasi, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6(1), 1–17. <https://doi.org/10.35448/jequ.v6i1.4143>
- Sukirno, S. (2015). *Mikroekonomi Teori Pengantar* (Ketiga). PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (2016). *Makroekonomi Teori Pengantar* (Edisi ke-3). PT. Raja Grafindo Persada.
- Sulistiawati, R. (2012). Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia. *Jurnal Eksos*, 8, 195–211.
- Suwatno, H., & Priansa, D. J. (2013). *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis*. Alfabeta.
- Tumilar, T. V, Maramis, M. T. B., & Siwu, H. F. D. (2022). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(5), 61–72.
- Yehosua, S. A., Rotinsulu, T. O., & Niode, A. O. (2019). Pengaruh Inflasi Dan Suku Bunga Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(01), 20–31.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Data panel Tingkat Pendidikan (X_1), Upah Minimum (X_2), Jumlah Penduduk (X_3), dan Pengangguran (Y) di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat

TAHUN	KAB/KOTA	Pengangguran (Y)	Pendidikan (X_1)	Upah Minimum (X_2)	Jumlah Penduduk (X_3)
2017	Sambas	0.0424	6.67	2.022.800	258.052
2018	Sambas	0.033	6.68	2.200.000	265.433
2019	Sambas	0.0348	6.70	2.377.000	268.913
2020	Sambas	0.0371	6.71	2.580.000	293.125
2021	Sambas	0.0397	6.72	2.609.393	290.242
2017	Bengkayang	0.024	6.09	2.013.450	124.964
2018	Bengkayang	0.0236	6.27	2.189.000	131.664
2019	Bengkayang	0.0266	6.53	2.364.777	129.369
2020	Bengkayang	0.0391	6.76	2.566.091	140.918
2021	Bengkayang	0.0442	6.80	2.586.291	132.607
2017	Landak	0.0203	7.08	2.000.920	193.719
2018	Landak	0.0223	7.09	2.175.200	195.314
2019	Landak	0.0269	7.10	2.349.870	180.893
2020	Landak	0.0338	7.11	2.549.844	199.077
2021	Landak	0.0322	7.12	2.582.000	198.391
2017	Mempawah	0.0672	6.47	1.901.005	117.319
2018	Mempawah	0.0679	6.63	2.066.600	120.203
2019	Mempawah	0.0511	6.82	2.232.600	118.295
2020	Mempawah	0.0755	7.03	2.422.594	125.463
2021	Mempawah	0.0771	7.04	2.437.279	120.592
2017	Sanggau	0.0327	6.93	1.973.425	232.810
2018	Sanggau	0.0242	6.94	2.145.310	244.079
2019	Sanggau	0.03	6.95	2.318.000	235.732
2020	Sanggau	0.0352	7.15	2.515.262	250.827
2021	Sanggau	0.0345	7.39	2.547.405	251.041
2017	Ketapang	0.0397	7.03	2.172.500	210.311
2018	Ketapang	0.0327	7.04	2.439.300	237.918
2019	Ketapang	0.0317	7.26	2.636.000	239.776
2020	Ketapang	0.0439	7.31	2.860.323	252.375
2021	Ketapang	0.073	7.46	2.876.252	233.445
2017	Sintang	0.0694	6.72	2.025.000	205.388
2018	Sintang	0.0193	6.73	2.215.000	208.508
2019	Sintang	0.0228	6.89	2.393.000	211.912
2020	Sintang	0.031	7.07	2.596.644	233.445

2021	Sintang	0.045	7.08	2.611.966	243.809
2017	Kapuas Hulu	0.0395	7.02	2.028.800	142.771
2018	Kapuas Hulu	0.0221	7.25	2.204.650	141.104
2019	Kapuas Hulu	0.0154	7.47	2.381.700	146.309
2020	Kapuas Hulu	0.0243	7.52	2.483.000	146.654
2021	Kapuas Hulu	0.0402	7.53	2.486.796	146.651
2017	Sekadau	0.0064	6.57	1.931.180	115.491
2018	Sekadau	0.0275	6.58	2.099.386	108.974
2019	Sekadau	0.0304	6.60	2.267.970	111.776
2020	Sekadau	0.0339	6.83	2.461.000	116.479
2021	Sekadau	0.0292	6.85	2.486.031	108.923
2017	Melawi	0.0211	6.53	1.948.500	111.964
2018	Melawi	0.0305	6.66	2.118.214	108.014
2019	Melawi	0.0239	6.67	2.288.306	111.394
2020	Melawi	0.027	6.76	2.483.040	115.559
2021	Melawi	0.0266	6.91	2.515.896	114.766
2017	Kayong Utara	0.05	5.85	2.130.300	45.248
2018	Kayong Utara	0.0386	5.86	2.315.850	50.736
2019	Kayong Utara	0.0389	6.00	2.501.850	52.114
2020	Kayong Utara	0.0371	6.01	2.714.750	54.405
2021	Kayong Utara	0.0378	6.02	2.748.507	55.171
2017	Kubu Raya	0.0591	6.58	1.907.040	254.314
2018	Kubu Raya	0.0494	6.81	2.075.000	252.023
2019	Kubu Raya	0.055	6.82	2.242.000	266.776
2020	Kubu Raya	0.0714	6.83	2.433.000	290.584
2021	Kubu Raya	0.0702	7.00	2.467.630	293.917
2017	Kota Pontianak	0.0936	9.79	1.972.000	297,834
2018	Kota Pontianak	0.1021	9.90	2.145.000	291.925
2019	Kota Pontianak	0.0906	10.14	2.318.000	299.065
2020	Kota Pontianak	0.1236	10.17	2.515.000	302.735
2021	Kota Pontianak	0.1238	10.43	2.579.616	317.161
2017	Kota Singkawang	0.0808	7.30	1.991.529	98.045
2018	Kota Singkawang	0.0775	7.57	2.164.991	95.504
2019	Kota Singkawang	0.0631	7.72	2.338.840	106.963
2020	Kota Singkawang	0.0878	7.89	2.537.875	107.152
2021	Kota Singkawang	0.0916	7.90	2.596.120	110.114

Lampiran 2 : CEM

Dependent Variable: Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 02/22/23 Time: 06:57				
Sample: 2017 2021				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 14				
Total panel (balanced) observations: 70				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.036429	0.320485	0.113667	0.9098
X1	0.020774	0.002837	7.323124	0.0000
LOGX2	-0.008362	0.021908	-0.381696	0.7039
LOGX3	-0.002990	0.002613	-1.144185	0.2567
R-squared	0.495484	Mean dependent var		0.046056
Adjusted R-squared	0.472551	S.D. dependent var		0.025588
S.E. of regression	0.018584	Akaike info criterion		-5.077623
Sum squared resid	0.022793	Schwarz criterion		-4.949138
Log likelihood	181.7168	Hannan-Quinn criter.		-5.026587
F-statistic	21.60615	Durbin-Watson stat		0.504559
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 3 : FEM

Dependent Variable: Y Method: Panel Least Squares Date: 02/22/23 Time: 06:58 Sample: 2017 2021 Periods included: 5 Cross-sections included: 14 Total panel (balanced) observations: 70				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.163356	0.281912	-0.579457	0.5647
X1	0.015551	0.013987	1.111839	0.2712
LOGX2	0.007242	0.024532	0.295189	0.7690
LOGX3	-0.001410	0.001753	-0.804450	0.4247
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.867845	Mean dependent var	0.046056	
Adjusted R-squared	0.827949	S.D. dependent var	0.025588	
S.E. of regression	0.010614	Akaike info criterion	6.045815	
Sum squared resid	0.005971	Schwarz criterion	5.499752	
Log likelihood	228.6035	Hannan-Quinn criter.	5.828912	
F-statistic	21.75267	Durbin-Watson stat	1.888788	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 4 : Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests Equation: Untitled Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	11.487114	(13,53)	0.0000
Cross-section Chi-square	93.773425	13	0.0000

Lampiran 5 : REM

Dependent Variable: Y				
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)				
Date: 02/22/23 Time: 06:59				
Sample: 2017 2021				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 14				
Total panel (balanced) observations: 70				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.097096	0.210055	-0.462241	0.6454
X1	0.019425	0.004942	3.930395	0.0002
LOGX2	0.000866	0.015211	0.056926	0.9548
LOGX3	-0.001477	0.001708	-0.865066	0.3901
Effects Specification			S.D.	Rho
Cross-section random			0.017421	0.7293
Idiosyncratic random			0.010614	0.2707
Weighted Statistics				
R-squared	0.249160	Mean dependent var	0.012107	
Adjusted R-squared	0.215031	S.D. dependent var	0.011750	
S.E. of regression	0.010410	Sum squared resid	0.007153	
F-statistic	7.300530	Durbin-Watson stat	1.583512	
Prob(F-statistic)	0.000267			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.492018	Mean dependent var	0.046056	
Sum squared resid	0.022950	Durbin-Watson stat	0.493524	

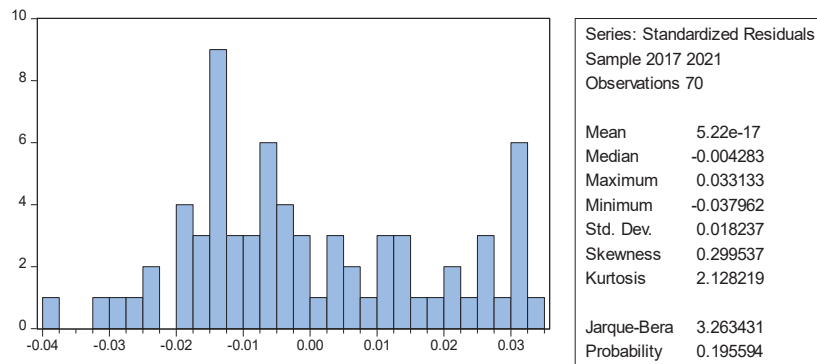
Lampiran 6 : Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.493009	3	0.9204

Lampiran 7 : Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects			
Null hypotheses: No effects			
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives			
	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	61.90218 (0.0000)	0.020989 (0.8848)	61.92317 (0.0000)
Honda	7.867794 (0.0000)	0.144875 (0.4424)	5.665812 (0.0000)
King-Wu	7.867794 (0.0000)	0.144875 (0.4424)	3.943130 (0.0000)
Standardized Honda	8.660443 (0.0000)	0.853819 (0.1966)	3.601268 (0.0002)
Standardized King-Wu	8.660443 (0.0000)	0.853819 (0.1966)	2.116165 (0.0172)
Gourieriou, et al.*	--	--	61.92317 (< 0.01)
*Mixed chi-square asymptotic critical values:			
	1%	7.289	
	5%	4.321	
	10%	2.952	

Lampiran 8 : Normalitas



Lampiran 9 : Uji Multikolinearitas

	X1	LOGX2	LOGX3
X1	1.000000	0.103819	0.512274
LOGX2	0.103819	1.000000	-0.134927
LOGX3	0.512274	-0.134927	1.000000

Lampiran 10 : Uji Heterokedastisitas

Dependent Variable: RESABS Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 02/22/23 Time: 08:39 Sample: 2017 2021 Periods included: 5 Cross-sections included: 14 Total panel (balanced) observations: 70 Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	21.75899	14.58826	1.491541	0.1406
X1	0.168867	0.196294	0.860275	0.3928
LOGX2	-1.400196	1.009999	-1.386333	0.1703
LOGX3	-0.174731	0.121787	-1.434723	0.1561